



S A L I N A N

B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0121 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 81);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Instansi adalah Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
12. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
13. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
14. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
15. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
16. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
17. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
18. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
19. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
20. Arsip Umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.
21. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
22. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan

yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

23. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
24. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggungjawab dibidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
25. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
26. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
27. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat didalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali arsip.
28. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
29. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
30. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
31. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
32. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
33. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
34. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
35. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
36. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
37. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat

menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

38. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dari Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. mendorong unit-unit kerja agar memberkaskan arsip dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya;
- b. memberikan petunjuk kepada unit-unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
- c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan reliabilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
- d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
- c. tersedianya informasi Pemerintah Daerah yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan Lampiran klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
- d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
- e. terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. arsip yang tercipta di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
- b. tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. setiap pegawai Pemerintah Daerah hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya; dan
- e. publik dapat mengakses informasi Pemerintah Daerah yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN ASAS KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah, mencakup antara lain :

- a. klasifikasi keamanan arsip, memuat informasi biasa/umum/terbuka, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
- b. pengamanan arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi terbatas, rahasia dan sangat rahasia; dan
- c. klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

Bagian Kedua

Asas Klasifikasi

Pasal 6

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

BAB IV

ARSIP DINAMIS

Pasal 7

- (1) Arsip Dinamis Pemerintah Daerah dapat diakses oleh pengguna secara internal dan eksternal.
- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Bupati, sebagai pimpinan tingkat tertinggi di Kabupaten, dapat mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. Sekretaris Daerah, sebagai pimpinan tingkat tinggi di Kabupaten, dapat mengakses arsip di bawah kewenangannya, tapi tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati, sebagai pimpinan tingkat tinggi, dapat mengakses seluruh arsip sesuai bidangnya setelah mendapatkan izin dari pimpinan tinggi yang terkait;
 - d. Kepala SKPD dan Pejabat Eselon III (Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagian), sebagai pimpinan tingkat menengah, dapat mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
 - e. Pejabat Eselon IV (Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang), Fungsional Arsiparis, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai pejabat pelaksana, hanya dapat mengakses seluruh arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa; dan
 - f. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegak hukum; dan
 - c. publik dapat mengakses informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Sarana klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis Pemerintah Daerah menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan Perangkat Lunak (*Software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filing cabinet*/ rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang *representative* sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak (*Software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip, aktif dan inaktif.

Pasal 9

- (1) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola arsip yang bertugas mengelola arsip harus dipilih pegawai yang professional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas.
- (2) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Arsip dinamis Pemerintah Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yang meliputi :

- a. biasa/terbuka;
- b. terbatas; dan
- c. rahasia.

Pasal 11

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. arsip dinamis yang meliputi Urusan Pertanian;
- b. arsip dinamis yang meliputi Urusan Perdagangan;
- c. arsip dinamis yang meliputi Urusan Perhubungan;
- d. arsip dinamis yang meliputi Urusan Kelautan dan Perikanan;
- e. arsip dinamis yang meliputi Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. arsip dinamis yang meliputi Urusan Lingkungan Hidup;

- g. arsip dinamis yang meliputi Urusan Perindustrian;
- h. arsip dinamis yang meliputi Urusan Penanggulangan Bencana;
- i. arsip dinamis yang meliputi Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- j. arsip dinamis yang meliputi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. arsip dinamis yang meliputi Urusan Pariwisata Ekonomi Kreatif;
- l. arsip dinamis yang meliputi Urusan Sosial;
- m. arsip dinamis yang meliputi Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- n. arsip dinamis yang meliputi Urusan Kesehatan;
- o. arsip dinamis yang meliputi Urusan Pemerintahan Daerah;
- p. arsip dinamis yang meliputi Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. arsip dinamis yang meliputi Urusan Pemuda dan Olahraga;
- r. arsip dinamis yang meliputi Urusan Agama;
- s. arsip dinamis yang meliputi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- t. arsip dinamis yang meliputi Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara, Keuangan, Non Keuangan dan Non Kepegawaian yaitu, Perencanaan, Hukum, Organisasi dan Tataaksana, Kearsipan, Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan, Hubungan Masyarakat, Penelitian Pengkajian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Kepustakaan, Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, Persandian, dan Pengawasan.

Pasal 12

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis Pemerintah Daerah, yang meliputi :

- a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Kepegawaian seperti *personal file*, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan rekam medis pegawai;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Perlengkapan dan layanan Pengadaan Barang/Jasa seperti dokumen pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
- c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat Daerah seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal serta Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
- d. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja; dan
- e. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Kearsipan seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

Pasal 13

Arsip dinamis Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mengandung dampak

yang luas hingga mengganggu kinerja Pemerintah Daerah, yang meliputi :

- a. arsip dinamis yang tercipta berkenaan dengan masalah keorganisasian, administrasi Kepegawaian, dan Hukum seperti kasus/sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan *personal file*;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari Biro Umum seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital, dan lain-lain; dan
- c. arsip dinamis yang tercipta dari Inspektorat seperti tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 14

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (*CCTV*), kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (2) Pengamanan arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas di simpan pada *filing cabinet* dan arsip kategori rahasia di simpan pada lemari besi.

Pasal 15

- (1) Penentuan Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip Aktif (PAA) di *Central File* Pemerintah Daerah.
- (2) Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di *Records Center* (Pusat Arsip) dalam menetapkan hak akses arsip.
- (3) Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif (PAA) mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di *central file*.

Pasal 16

- (1) Pengamanan Informasi Arsip Dinamis Pemerintah Daerah meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Records Centre* dan *Central File*.

Pasal 17

Tabel Klasifikasi Keamanan dan Pengamanan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Agustus 2018

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SISWANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 48

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 48 TAHUN 2018
 TANGGAL : 27 Agustus 2018

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
I	URUSAN PERTANIAN				
1	KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan, Pemasaran Hasil Pertanian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
2	PEMBINAAN a Data pengadaan, penyaluran, penggunaan dan peredaran (benih, pupuk, pestisida dan alat mesin) b Penyiapan fasilitas pengembangan (lahan, pemanfaatan sumber - sumber air, produksi pertanian) c Pemeliharaan lahan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
3	PENGEMBANGAN LAHAN DAN PRODUKSI a. Data potensi sumber daya lahan dan air b. Data perkembangan pengembangan lahan dan produksi pertanian c. Sumber daya lahan dan tata guna air d. Konservasi dan rehabilitasi lahan e. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi f. Data kawasan dan sentra - sentra produksi pertanian g. Luas panen, Produksi dan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut DPKH Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	h. Laporan hasil kegiatan pengembangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
4	PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN 1) Bina usaha pertanian a. Pengembangan usaha pertanian b. Data pengembangan usaha c. Bahan dan sarana d. Promosi dan pengembangan usaha e. Laporan pengembangan usaha 2) Kemitraan dan kewirausahaan pertanian a. Data kemitraan dan kewirausahaan b. Laporan kemitraan dan kewirausahaan 3) Mutu, distribusi dan pemasaran hasil pertanian a. Data kinerja benih/bibit dan mutu hasil pertanian b. Akreditasi mutu benih/bibit c. Bahan pembinaan uji mutu d. Sertifikat benih/bibit, mutu hasil pertanian e. Data penawaran dan permintaan hasil pertanian f. Laporan mutu distribusi dan pemasaran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
5	PEMBENIHAN DAN PENGEMBANGAN 1) Data pengadaan, penyaluran, penggunaan dan peredaran benih dan teknologi 2) Sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura 3) Pengembangan teknologi pertanian (produksi, sarana dan prasarana, pengolahan hasil pertanian, alat dan mesin, perbenihan)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
6	PROGRAM BIMAS/LINMAS (Program intensifikasi dan ekstensifikasi) Serangan penyakit dan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	DPKH Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
7	hama tanaman 1) Pencegahan 2) Pemberantasan BIMBINGAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PENGUSAHA DAN PETANI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
8	TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA A Pembinaan 1) Data pengadaan, penyaluran, penggunaan dan peredaran (benih, pupuk, pestisida, alat mesin) 2) Penyiapan fasilitas pengembangan (lahan, pemanfaatan sumber - sumber air, produksi pertanian) 3) Pemeliharaan lahan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PemerintahKab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
	B Pengembangan Lahan dan Produksi 1) Data potensi sumber daya lahan dan air 2) Data perkembangan pengembangan lahan dan produksi pertanian 3) Sumber daya lahan dan tata guna air 4) Konversasi dan rehabilitasi lahan 5) Sistem kewaspadaan pangan dan gizi 6) Data kawasan dan sentra-sentra produksi pertanian 7) Luas panen, produksi dan produktivitas tanaman dan hortikultura 8) Laporan hasil kegiatan pengembangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
	C Pemasaran dan Pengembangan Usaha Pertanian 1) Bina usaha pertanian (a) Pengembangan usaha pertanian (b) Data pengembangan usaha (c) Bahan dan sarana (d) Promosi dan pengembangan usaha (e) Dokumen penyaluran kredit pengembangan usaha tani	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut DPKH Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(f) Dokumen bantuan pengembangan usaha	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
	(g) Laporan pengembangan usaha	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
	2) Kemitraan dan kewirausahaan pertanian	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	(a) Data kemitraan dan kewirausahaan				
	(b) Laporan kemitraan dan kewirausahaan				
	3) Mutu, distribusi dan pemasaran hasil pertanian				
	(a) Data kinerja benih/bibit dan mutu hasil pertanian	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	(b) Akreditas mutu benih/bibit	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
	(c) Bahan pembinaan uji mutu	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	(d) Sertifikat benih/bibit, mutu hasil pertanian	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	(e) Data penawaran dan permintaan hasil pertanian	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	(f) Dokumen sisi mutu (Doksistu) otorius kompeten keamanan pangan daerah (OKKPD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
	(g) Hasil uji laboratorium tentang keamanan pangan produksi segar	Terbatas	Eselon III		
	(h) Hasil uji mutu produsen pangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
	(i) Laporan mutu distribusi dan pemasaran	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	D Pembenihan dan pengembangan teknologi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
	1) Data pengadaan, penyaluran, penggunaan dan peredaran benih dan teknologi				
	2) Sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura				
	3) Pengembangan teknologi pertanian (produksi, sarana dan prasarana, pengolahan hasil pertanian, alat dan mesin, perbenihan)				
	E Program Bimas/Linmas (program intensifikasi dan ekstensifikasi)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
	Serangan penyakit dan hama tanaman				
	1) Pencegahan				
	2) Pemberantasan				
	F Bimbingan dan penyuluhan terhadap pengusaha dan petani	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	DPKH

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
10	<p>PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN</p> <p>(1) Perluasan dan Pengelolaan Lahan</p> <p>(a) Basis Data Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Lahan - Analisis dan Penyajian Data Lahan <p>(b) Pengendalian Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan Analisis Lahan - Rekomendasi Teknis pengendalian lahan <p>(c) Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan. - Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan. <p>(d) Perluasan Kawasan Tanaman Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan. - Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan. <p>(e) Perluasan Kawasan Hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura - Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura. <p>(2) Pengelolaan Air Irigasi</p> <p>(a) Pengembangan Sumber Air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Air Permukaan - Air Tanah <p>(b) Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Jaringan - Optimasi Air <p>(c) Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>Kab.Tanah Laut</p> <p>DPKH Kab.Tanah Laut</p> <p>DPKH Kab.Tanah Laut</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> - Iklim - Konservasi Air dan Lingkungan Hidup (d) Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kelembagaan - Pengembangan Kelembagaan (3) Pembiayaan Pertanian (a) Pembiayaan Program <ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi pembiayaan program - Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program (b) Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama <ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan Syariah - Kerja Sama pembiayaan (c) Pembiayaan Agribisnis <ul style="list-style-type: none"> - Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis - Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis (d) Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan Agribisnis - Pemberdayaan Agribisnis (4) Pupuk Pestisida (a) Pupuk Organik dan Pembenah Tanah <ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Pangan - Hortikultura (b) Pupuk Anorganik <ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Pangan - Hortikultura (c) Pestisida <ul style="list-style-type: none"> - Pestisida Kimia - Pestisida Hayati (d) Pengawasan Pupuk dan Pestisida <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Pupuk - Pengawasan Pestisida (5) Alat dan Mesin Pertanian	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
	(4) Pupuk Pestisida (a) Pupuk Organik dan Pembenah Tanah <ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Pangan - Hortikultura (b) Pupuk Anorganik <ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Pangan - Hortikultura (c) Pestisida <ul style="list-style-type: none"> - Pestisida Kimia - Pestisida Hayati (d) Pengawasan Pupuk dan Pestisida <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Pupuk - Pengawasan Pestisida (5) Alat dan Mesin Pertanian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
	(5) Alat dan Mesin Pertanian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	DPKH

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
11	(a) Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian - Tanaman Pangan dan Hortikultura (b) Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian - Tanaman Pangan dan Hortikultura (c) Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian - Kelembagaan - Pelayanan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Kab.Tanah Laut
	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN (1) Pengolahan Hasil Pertanian (a) Tanaman Pangan - Sereal - Aneka Kacang dan Aneka Umbi (b) Hortikultura - Tanaman Buah dan Sayuran - Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
	(2) Mutu dan Standarasi (a) Standardisasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan (b) Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan (c) Akreditasi dan Kelembagaan - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan (d) Kerjasama dan Harmonisasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
	(3) Pengembangan Usaha dan Investasi (a) Kemitraan dan Kewirausahaan - Kemitraan - Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif (b) Investasi			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan <p>(c) Promosi Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daya Saing - Eksibisi dan Ekspo <p>(d) Promosi Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daya Saing - Eksibisi dan Ekspo <p>(4) Pemasaran Domestik</p> <p>(a) Informasi Pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis Pasar - Deseminasi Informasi Pasar <p>(b) Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Pasar - Stabilisasi Harga <p>(c) Sarana dan Kelembagaan Pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana Pasar - Kelembagaan Pasar <p>(d) Jaringan Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses Pasar - Sarana Pemasaran 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
12	PERKEBUNAN				
	A Tanaman Semusim				
	1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	a. Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim				
	b. Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	2) Perbenihan				
	a. Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim				
	b. Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	3) Budidaya				
	a. Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> b. Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim 4) Pemberdayaan dan Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan Tanaman Semusim b. Kelembagaan Tanaman Semusim 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	B Tanaman Rempah & Penyegar <ul style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar b. Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar 2) Perbenihan <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar b. Bimbingan Peredaran Tanaman Rempah & Penyegar 3) Budidaya <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar b. Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar 4) Pemberdayaan dan Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan Tanaman Rempah & Penyegar b. Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	C Tanaman Tahunan <ul style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunan b. Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan 2) Perbenihan <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan Perbenihan Tanaman Tahunan b. Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan 3) Budidaya <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<div>b. Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan</div> <div>4) Pemberdayaan dan Kelembagaan<div>a. Pemberdayaan Tanaman Tahunan</div><div>b. Kelembagaan Tanaman Tahunan</div></div> <div>D Perlindungan Perkebunan<div>1) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim<div>a. Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim</div><div>b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim</div></div><div>2) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar<div>a. Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar</div><div>b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar</div></div><div>3) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan<div>a. Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan</div><div>b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan</div></div><div>4) Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran<div>a. Dampak Perubahan Iklim</div><div>b. Pencegahan Kebakaran</div></div><div>E Pembinaan Usaha<div>1) Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan<div>a. Bimbingan Usaha Perkebunan</div><div>b. Perkebunan Berkelanjutan</div></div></div></div>	<div>Terbatas</div> <div>Terbatas</div> <div>Terbatas</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon III</div> <div>Eselon III</div> <div>Eselon III</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div>	<div>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut</div> <div>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut</div> <div>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut</div>	<div>DTPHP Kab.Tanah Laut</div> <div>DTPHP Kab.Tanah Laut</div> <div>DTPHP Kab.Tanah Laut</div> <div>DTPHP Kab.Tanah Laut</div> <div>DTPHP Kab.Tanah Laut</div>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	2) Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik a. Gangguan Usaha Perkebunan b. Penanganan Konflik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	3) Proses Penyelesaian Pengusutan Benih Ilegal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	4) Proses Penyelesaian Pengusutan Peredaran Pupuk dan Peredaran Pestisida	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	5) Proses Penyelesaian Sengketa Perusahaan Perkebunan Besar Negara/Swasta	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	6) Proses Usulan Penilaian Usaha Perkebunan Negara/Swasta	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
13	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN A Perbibitan Ternak 1) Produksi Bibit Ternak Ruminansia a. Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar b. Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil 2) Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia a. Produksi Bibit Ternak Unggas b. Produksi Bibit Aneka Ternak	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<div>3) Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak<ul style="list-style-type: none">a. Penilaian Bibit Ternakb. Pelepasan Bibit Ternak</div> <div>4) Mutu Bibit ternak<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikasi Bibit Ternakb. Pengawasan Mutu Bibit Ternak</div> <div>5) Pengembangan Bibit Ternak<ul style="list-style-type: none">a. Analisis Pengembangan Bibit Ternakb. Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak</div> <div>6) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran</div>				
	<div>B Pakan Ternak</div> <div>1) Bahan Pakan<ul style="list-style-type: none">a. Bahan Pakan Asal Hewanb. Bahan Pakan Asal Tumbuhan</div> <div>2) Pakan Hijauan<ul style="list-style-type: none">a. Budidaya Pakan Hijauanb. Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak</div> <div>3) Pakan Olahan<ul style="list-style-type: none">a. Produksi Pakan Olahanb. Pengolahan Pangan</div> <div>4) Mutu Pakan<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikasi Pakanb. Pengawasan Pakan</div> <div>5) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut
	<div>C Budidaya Ternak</div> <div>1) Ternak Potong<ul style="list-style-type: none">a. Ternak Sapi dan Kerbau Potongb. Ternak Kambing dan Domba Potong</div> <div>2) Ternak Perah<ul style="list-style-type: none">a. Ternak Sapi dan Kerbau Perah</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPKH Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<div>b. Ternak Kambing Perah</div> <div>3) Ternak Unggas dan Aneka Ternak</div> <div><div>a. Ternak Unggas</div><div>b. Aneka Ternak dan Monogastrik</div></div> <div>4) Usaha dan Kelembagaan</div> <div><div>a. Pemberdayaan masyarakat/lembaga (LM3)</div><div>b. Sarjana Membangun Desa (SMD)</div></div> <div>D Kesehatan Hewan</div> <div><div>1) Pengamatan Penyakit Hewan</div><div><div>a. Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner</div><div>b. Penyidikan Penyakit Hewan</div></div></div> <div>2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan</div> <div><div>a. Pencegahan Penyakit Hewan</div><div>b. Pemberantasan Penyakit Hewan</div><div>c. Rekomendasi MBM</div></div> <div>3) Perlindungan Hewan</div> <div><div>a. Analisis Risiko Penyakit Eksotik</div><div>b. Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan</div></div> <div>4) Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan</div> <div><div>a. Kelembagaan Kesehatan Hewan</div><div>b. Sumber Daya Kesehatan Hewan</div><div>c. Laporan THL</div><div>d. Proposal Poskeswan</div></div> <div>5) Pengawasan Obat Hewan</div> <div><div>a. Mutu Obat Hewan</div><div>b. Peredaran Obat Hewan</div><div>c. Pendaftaran Obat Hewan</div><div>d. Rekomendasi Obat Hewan</div></div> <div>E Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen</div> <div><div>1) Pascapanen</div><div><div>a. Teknologi Pascapanen</div><div>b. Sarana Pascapanen</div></div></div> <div>2) Higien Sanitasi</div>	<div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div>	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut</div>	<div>DPKH Kab.Tanah Laut</div> <div>DPKH Kab.Tanah Laut</div>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<div>a. Penerapan Higiene Sanitasi</div> <div>b. Inspeksi Higiene Sanitasi</div> <div>3) Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan</div> <div>a. Pengawasan Sanitary</div> <div>b. Pengawasan Keamanan Produk Hewan</div>				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
14	4) Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan a. Zoonosis b. Kesejahteraan Hewan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DKP Kab.Tanah Laut
	5) Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan a. Pengujian Produk Hewan; b. Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan				
	6) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran				
	KETAHANAN PANGAN				
	A Harga dan Cadangan Pangan 1) Data harga pangan pokok Kabupaten/Kota 2) Data pasokan di pasar dan eceran 3) Stok cadangan pangan				
	B Distribusi Pangan 1) Pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) 2) Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (P-LDPM) 3) Akses pangan				
	C Pengawasan Keamanan Pangan 1) Pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) (a) Uji laboratorium (b) Uji rapit tes kit 2) Laporan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)				
	D Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan 1) Sistem jaminan mutu OKKPD (a) Pelaku usaha (b) Uji laboratorium (c) Produsen pangan 2) Informasi keamanan pangan				
	E Kerawanan Pangan 1) FSVA 2) SKPG 3) Database desa mandiri pangan				
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DKP Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	4) Database kawasan mandiri pangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	5) Daerah rawan pangan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKP Kab.Tanah Laut
	F Ketersediaan Pangan 1) Lumbung pangan 2) Analisis ketersediaan pangan (a) HBKN (b) PPH Ketersediaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PKab.Tanah Laut	DKP Kab.Tanah Laut
	G Promosi dan Penganekaragaman Pangan 1) Promosi penganekaragaman pangan (a) Pameran 2) Diversifikasi pangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DKP Kab.Tanah Laut
	H Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal 1) Pengembangan pangan lokal (a) KRPL (b) Usaha kecil menengah (UKM) 2) Pengelolaan konsumsi pangan masyarakat (a) Lomba cipta menu (LCM) (b) Beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) (c) Pola pangan harapan (PPH) 3) Pokjanal Posyandu	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DKP Kab.Tanah Laut
15	KESEHATAN HEWAN A Perbibitan Ternak 1) Produksi bibit ternak Ruminansia (a) Produksi bibit ternak Ruminansia besar (b) Produksi bibit ternak Ruminansia kecil	Terbuka	Eselon II & III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	DPKH Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	2) Produksi bibit ternak Non Ruminansia (a) Produksi bibit ternak unggas (b) Produksi bibit aneka ternak	Terbuka	Eselon II & III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	DPKH Kab.Tanah Laut
	3) Penilaian dan pelapasan bibit ternak (a) Penilaian bibit ternak (b) Penilaian bibit aneka ternak	Terbatas	Eselon II & III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	DPKH Kab.Tanah Laut
	4) Mutu bibit ternak (a) Sertifikasi bibit ternak (b) Pelepasan bibit ternak	Terbatas	Eselon II & III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	DPKH Kab.Tanah Laut
	5) Pengembangan bibit ternak (a) Analisis pengembangan bibit ternak (b) Kelembagaan pengembangan bibit ternak	Terbuka	Eselon II & III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemprov. Kalsel	DPKH Kab.Tanah Laut
	6) Surat rekomendasi & persetujuan pemasukan/pengeluaran	Terbatas	Eselon II & III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	DPKH Kab.Tanah Laut
	B Pakan Ternak				
	1) Bahan pakan (a) Bahan pakan asal hewan (b) Bahan pakan asal tumbuhan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	DPKH Kab.Tanah Laut
	2) Pakan hijauan (a) Budidaya pakan hijauan (b) Kawasan pengembalaan dan integrasi ternak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	DPKH Kab.Tanah Laut
	3) Pakan Olahan (a) Produksi pakan olahan (b) Pengolahan pangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	DPKH Kab.Tanah Laut
	4) Mutu pakan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	DPKH

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(a) Sertifikasi pakan (b) Pengawasan pakan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	Kab.Tanah Laut
	5) Surat rekomendasi & persetujuan pemasukan/pengeluaran			Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	DPKH Kab.Tanah Laut
	C Budidaya Ternak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	DPKH Kab.Tanah Laut
	1) Ternak potong (a) Ternak sapi dan kerbau potong (b) Ternak kambing dan domba potong				
	2) Ternak perah (a) Ternak sapi dan kerbau perah (b) Ternak kambing perah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	DPKH Kab.Tanah Laut
	3) Ternak unggas dan aneka ternak (a) Ternak unggas (b) Aneka ternak dan monogastrik	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemprov. Kalsel	DPKH Kab.Tanah Laut
	4) Usaha dan kelembagaan (a) Pemberdayaan masyarakat/lembaga (LM3) (b) Sarjana membangun desa (c) Dokumen penyaluran kredit pengembangan usaha tani (d) Dokumen bantuan pengembangan usaha	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	DPKH Kab.Tanah Laut
	D Kesehatan Hewan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	DPKH Kab.Tanah Laut
	1) Pengamatan penyakit hewan (a) Epidemiologi dan ekonomi veteriner (b) Penyidikan penyakit hewan				
	2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (a) Pencegahan penyakit hewan (b) Pemberantasan penyakit hewan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	DPKH Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(c) Rekomendasi MBM			Pemerintah Prov. Kalsel	
	3) Perlindungan Hewan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	DPKH Kab.Tanah Laut
	(a) Analisis risiko penyakit eksotik				
	(b) Kesiagaan darurat penyakit hewan				
	4) Kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	
	(a) kelembagaan kesehatan hewan				
	(b) Sumber daya kesehatan hewan				
	(c) Laporan THL				
	(d) Proposal Poskeswan				
	5) Pengawasan obat hewan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	
	(a) Mutu obat hewan				
	(b) Peredaran obat hewan				
	(c) Pendaftaran obat hewan				
	(d) Rekomendasi obat hewan				
E	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen				
	1) Pascapanen	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemprov. Kalsel	DPKH Kab.Tanah Laut
	(a) Teknologi pascapanen				
	(b) Sarana pascapanen				
	2) Higien Sanitasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	
	(a) Penerapan higiene sanitasi				
	(b) Inspeksi higieni sanitasi				
	3) Pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	
	(a) Pengawasan sanitary				
	(b) Pengawasan keamanan produk hewan				
	4) Zoonosis dan kesejahteraan hewan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	
	(a) Zoonosis				
	(b) Kesejahteraan hewan				
	5) Pengujian dan sertifikasi produk hewan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	
	(a) Pengujian produk hewan				
	(b) Registrasi dan sertifikasi produk hewan				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
16	6) Surat rekomendasi dan persetujuan pemasukan/pengeluaran	Terbatas	Eselon III	Pemerintah Kab.Tanah Laut Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	
	PERKEBUNAN				
	A Tanaman Semusim	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	1) Identifikasi dan pendayagunaan sumber daya				
	(a) Identifikasi sumber daya tanaman semusim				
	(b) Pendayagunaan sumber daya tanaman semusim				
	2) Perbenihan	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	(a) Penyiapan perbenihan tanaman semusim				
	(b) Bimbingan peredaran benih tanaman semusim				
	3) Budidaya	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	(a) Penyiapan teknologi budidaya tanaman semusim				
	(b) Penerapan teknologi budidaya tanaman semusim				
	4) Pemberdayaan dan kelembagaan	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	(a) Pemberdayaan tanamanan semusim				
	(b) Kelembagaan tanaman semusim				
	B Tanaman Rempah dan Penyegar				
	1) Identifikasi dan pendayagunaan sumber daya	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	(a) Identifikasi sumber daya tanaman rempah dan penyegar				
	(b) Pendayagunaan sumber daya tanaman rempah dan penyegar				
	2) Perbenihan	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	(a) Penyiapan perbenihan tanaman rempah dan penyegar				
	(b) Bimbingan peredaran tanaman rempah dan penyegar				
	3) Budidaya	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	(a) Penyiapan teknologi budidaya tanaman rempah dan penyegar				
	(b) Penerapan teknologi budidaya tanaman rempah dan				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	penyegar				
	4) Pemberdayaan dan kelembagaan	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	(a) Pemberdayaan tanaman rempah dan penyegar				
	(b) Kelembagaan tanaman rempah dan penyegar				
	C Tanaman Tahunan				
	1) Identifikasi dan pendayagunaan sumber daya	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	(a) Identifikasi sumber daya tanaman tahunan				
	(b) Pendayagunaan sumber daya tanaman tumbuhan				
	2) Perbenihan	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	(a) Penyiapan perbenihan tanaman tahunan				
	(b) Bimbingan peredaran benih tanaman tahunan				
	3) Budidaya	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	(a) Penyiapan teknologi budidaya tanaman tahunan				
	(b) Penyiapan teknologi budidaya tanaman tahunan				
	4) Pemberdayaan dan kelembagaan	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	(a) Pemberdayaan tanaman tahunan				
	(b) Kelembagaan tanaman tahunan				
	D Perlindungan Perkebunan				
	1) Identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	(a) Identifikasi organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim				
	(b) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim				
	2) Identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan rempah dan penyegar	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	(a) Identifikasi organisme pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar				
	(b) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar				
	3) Identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DTPHP Kab.Tanah Laut
	(a) Identifikasi organisme pengganggu tumbuhan tanaman				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	tahunan (b) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan 4) Dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran (a) Dampak perubahan iklim (b) Pencegahan kebakaran 5) Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal 6) Proses penyelesaian pengusutan peredaran pupuk dan peredaran pestisida 7) Proses penyelesaian sengketa perusahaan perkebunan besar Negara/swasta 8) Proses usulan penilaian usaha perkebunan Negara/swasta	 Terbuka Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	 Eselon IV Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	 Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	 DTPHP Kab.Tanah Laut DTPHP Kab.Tanah Laut DTPHP Kab.Tanah Laut DTPHP Kab.Tanah Laut DTPHP Kab.Tanah Laut
	II URUSAN PERDAGANGAN				
	1 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	2 PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	3 PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
4	PELELANGAN BARANG KOMODITAS	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
5	PROMOSI / PEMASARAN (A) Pameran Perdagangan (B) Iklan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
6	EKSPOR DAN IMPORT	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
7	PENGAWASAN DISTRIBUSI/PENYALURAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
8	PERDAGANGAN ANTAR PULAU	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
9	SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) BARANG	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
10	PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPOR (API)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
11	DOKUMEN LAINNYA DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
12	PERLINDUNGAN KONSUMEN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
13	PENGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PERGUDANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
14	ANEKA USAHA PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
15	BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
16	STANDARISASI HARGA	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
III	URUSAN PERHUBUNGAN				
1	KEBIJAKAN MENGENAI PERHUBUNGAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DISHUB Kab.Tanah Laut
2	LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA	Biasa/Terbuka	Eselon IV		DISHUB Kab.Tanah Laut
	A. Jaringan prasarana dan pelayanan: 1) Penentuan dan penetapan lokasi terminal 2) Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal 3) Pemanfaatan terminal 4) Jaringan trayek angkutan, jaringan lintas jalan primer, dan 5) Penetapan kelas jalan primer 6) Kualifikasi teknis petugas terminal				
	B. Pengembangan transportasi jalan				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	1) Peta jalan raya 2) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan 3) Pengembangan transportasi jalan C. Sarana angkutan jalan 1) Pengujian kendaraan bermotor 2) Teknologi kendaraan bermotor (pengujian, persyaratan teknis) D. Lalu lintas jalan 1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas 2) Perlengkapan jalan E. Angkutan jalan 1) Angkutan penumpang 2) Angkutan barang F. Pengendalian operasional 1) Monitoring operasional 2) Teknis penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerjaKab.Tanah Laut	DISHUB Kab.Tanah Laut
	3 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN A. Jaringan transportasi (analisa, evalusi, trayek dan B. Sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan C. Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan D. Peta aliran sungai, peta wilayah danau, tata cara, dan				
	4 PERKERETAAPIAN A. Peta pintu lintasan kereta api B. Pemanfaatn stasiun C. Penggunaan signal				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
5	PERHUBUNGAN LAUT A. Keamanan lalu lintas (penjagaan, rambu-rambu dan mercusuar) B. Kegiatan pelayaran (dalam dan luar negeri) C. Data kapal dan trayek perkapalan D. Penggunaan pelabuhan E. Kegiatan pengerukan laut yang mendangkal F. Kegiatan penjagaan pantai	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DISHUB Kab.Tanah Laut
6	PERHUBUNGAN UDARA A. Kegiatan keamanan lalu lintas udara B. Pemanfaatan pelabuhan udara C. Sarana angkutan udara dan trayek penerbangan, terminal, jalan, pelabuhan samudra, pelabuhan udara, tempat parker, rambu- D. Pelaksanaan program meliputi: pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerjaKab.Tanah Laut Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISHUB Kab.Tanah Laut DISHUB Kab.Tanah Laut DISHUB Kab.Tanah Laut DISHUB Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
7	PENYULUHAN Meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan jadwal waktu, pembiayaan dan laporan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DISHUB Kab.Tanah Laut
8	BANTUAN DANA, PENANAMAN MODAL	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISHUB Kab.Tanah Laut
9	STANDARISASI PERHUBUNGAN Meliputi : Sarana dan prasarana, data dan statistik	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DISHUB Kab.Tanah Laut
10	PEMASARAN HASIL PRODUKSI Meliputi: Promosi perhubungan, perlindungan, perhubungan, penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DISHUB Kab.Tanah Laut
11	PERIZINAN Meliputi : Izin mengemudi, izin trayek, izin jalan, izin laut, izin udara dan pemasangan kabel	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DISHUB Kab.Tanah Laut
12	KEAMANAN DAN KETERTIBAN Meliputi : Ketertiban lalu lintas, pencegahan dan penyelesaian pelanggaran, pengamanan frekuensi, penyeberangan, pengawasan radio amatir dan penetapan jaringan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISHUB Kab.Tanah Laut
13	LAPORAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DISHUB Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
IV	1 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEBIJAKAN Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Biasa/Tertulis	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DKPP Kab.Tanah Laut
	2 PENGOLAHAN RUANG LAUT A Konservasi Ekosistem Laut 1) Data ekosistem laut dan pesisir yang dilindungi 2) Peta/zona konservasi ekosistem laut, pesisir dan keanekaragaman hayati	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DKPP Kab.Tanah Laut DKPP Kab.Tanah Laut
	4) Kemitraan dengan masyarakat dan atau lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan konservasi ekosistem laut, pesisir dan keanekaragaman hayati	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DKPP Kab.Tanah Laut
	5) Konservasi ekosistem laut, pesisir dan keanekaragaman hayati	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DKPP Kab.Tanah Laut
	B Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut 1) Pemetaan ruang laut dan pesisir 2) Data potensi sumberdaya laut dan pesisir 3) Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi pesisir dan pantai 4) Penataan ruang laut dan pesisir untuk pengembangan ekosistem daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DKPP Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
3	5) Penerbitan izin usaha pemanfaatan ruang laut dan pesisir sesuai kewenangan 6) Monitoring dan evaluasi penataan pemanfaatan ruang laut dan pesisir C Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan PPK 1) Rencana Bimtek Masyarakat Pesisir dan PPK 2) Data pesisir dan PPK 3) Supervisi pemberdayaan masyarakat pesisir dan PPK 4) Monitoring dan evaluasi masyarakat pesisir dan PPK	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DKPP Kab.Tanah Laut
	PERIKANAN TANGKAP A. Kenelayanan 1) Data kelembagaan/kelompok nelayan 2) Bimtek pengembangan SDM nelayan secara kelembagaan/kelompok 3) Lembaga/kelompok usaha kenelayanan 4) Perlindungan nelayan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DKPP Kab.Tanah Laut
	B Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan 1) Pengelolaan pemanfaatan dan menjaga kelestarian sumberdaya penangkapan 2) Pengelolaan kawasan tangkapan yang mempunyai sumberdaya penangkapan potensial 3) Penerbitan izin usaha perikanan penangkapan ikan diatas 5 GT sd 30 GT 4) Pemantauan penggunaan alat tangkap 5) Pengendalian penangkapan 6) Monitoring dan evaluasi kelestarian sumberdaya tangkap	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DKPP Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
4	C Sarana dan Prasarana Penangkapan 1) Petunjuk teknis pelaksanaan 2) Peningkatan dan pengembangan prasarana penangkapan 3) Rehabilitasi dan pembangunan seta pengelolaan pelabuhan perikanan 4) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penangkapan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DKPP Kab.Tanah Laut
	PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN				
	A Perizinan Usaha dan Investasi 1) Pengelolaan perizinan usaha 2) Data potensi perikanan 3) Pemeriksaan permohonan izin usaha 4) Penerbitan izin usaha	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DKPP Kab.Tanah Laut
	B Teknologi dan Informasi 1) Petunjuk teknis teknologi dan informasi 2) Data pelaku usaha 3) Bimbingan teknologi dan informasi 4) Evaluasi pengembangan teknologi dan informasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DKPP Kab.Tanah Laut
	C Sarana dan Prasarana Budidaya Pengolahan dan Pemasaran 1) Petunjuk teknis sarana dan prasarana budidaya pengolahan 2) Data sarana prasarana budidaya pengolahan dan pemasaran perikanan 3) Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya pengolahan pemasaran perikanan 4) Memfasilitasi pembangunan 5) Penerbitan izin usaha 6) Pemantauan pengembangan pembangunan sarana dan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DKPP Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
5	<p>prasarana budidaya</p> <p>7) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran</p> <p>PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>A Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Keluar dan Perikanan</p> <p>1) Rencana pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>2) Bimtek pemantauan sumber daya kelauran dan perikanan</p> <p>3) Jadwal pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>4) Rencana operasi pengawasan penangkapan ikan</p> <p>5) Pemantauan kelompok masyarakat pengawasan sumber daya</p> <p>6) Monitoring dan evaluasi pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>B Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum</p> <p>1) Rencana penanganan pelanggaran dan penegakan hukum</p> <p>2) Data pelanggaran dan komflik masyarakat kelautan dan perikanan</p> <p>3) Bimtek pelanggaran kelautan dan perikanan</p> <p>4) Pemantauan penanganan dan pelanggaran dan penegakan hukum</p> <p>5) Monitoring dan evaluasi penanganan dan pelanggaran dan penegakan hukum</p> <p>C Sarana dan Prasarana pengawasan</p> <p>1) Rencana sarana dan prasarana pengawasan</p> <p>2) Data sarana dan prasarana pengawasan</p> <p>3) Sosialisasi dan Bimtek sarana dan prasarana pengawasan</p> <p>4) Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan</p> <p>5) Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan</p> <p>6) Fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut</p>	<p>DKPP Kab.Tanah Laut</p> <p>DKPP Kab.Tanah Laut</p> <p>DKPP Kab.Tanah Laut</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
V	7) Pemantauan pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan 8) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pengawasan				
	URUSAN PENANAMAN MODAL				
	1 KEBIJAKAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPMPTSP Kab.Tanah Laut
	2 PERENCANAAN PENANAMAN MODAL				
	A Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPMPTSP Kab.Tanah Laut
	1) Agribisnis				
	a) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan				
	b) Kelautan, Perikanan dan Peternakan				
	2) Energi				
	a) Energi Terbarukan				
	b) Energi Tak Terbarukan				
	3) Daya Mineral				
	a) Mineral Logam				
	b) Mineral Non Logam				
	B Perencanaan Industri Manufaktur	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPMPTSP Kab.Tanah Laut
	1) Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka				
	a) Industri Logam dan Mesin				
	b) Industri Tekstil dan Aneka				
	2) Industri Kimia				
	a) Industri Kimia Dasar				
	b) Industri Barang Kimia dan Farmasi				
	3) Industri Alat Transportasi dan Telematika				
	a) Industri Alat Transportasi dan Telematika				
	b) Industri Telematika				
	C Jasa dan Kawasan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	DPMPTSP Kab.Tanah Laut
	1) Jasa Perdagangan dan Pariwisata				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	a) Jasa Perdagangan b) Jasa Pariwisata 2) Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya a) Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan b) Jasa Lainnya 3) Kawasan Ekonomi a) Kawasan Ekonomi Khusus b) Kawasan Ekonomi Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Kab.Tanah Laut	DPMPTSP Kab.Tanah Laut
	D Perencanaan Infrastruktur 1) Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan a) Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan 2) Insfrastruktur Energi dan Sumber Daya Air a) Infrastruktur Energi b) Infrastruktur Sumber Daya Air 3) Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Insfrastruktur Lainnya a) Infrastruktur Transportasi Laut b) Infrastruktur Transportasi Udara dan Insfrastruktur Lainnya			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	
	E Rencana alokasi bersubsidi			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	
	F Rencana Alokasi Dana Talangan untuk Kabupaten				
3	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPMPTSP Kab.Tanah Laut
	A Deregulasi Penanaman Modal 1) Sektor Primer a) Pertanian, Kelautan dan Perikanan b) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan 2) Sektor Sekunder a) Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika b) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
4	3) Sektor Tersier a) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi b) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya				
	PROMOSI PENANAMAN MODAL				
	A Pengembangan Promosi 1) Analisis Strategi Promosi a) Analisis Target Promosi b) Analisis Daya Saing Promosi 2) Fasilitas Promosi Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPMPTSP Kab.Tanah Laut
	B Promosi Sektoral 1) Daya Alam, Jasa dan Kawasan a) Industri Sumber Daya Alam b) Jasa dan Kawasan 2) Promosi Industri Manufaktur a) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik b) Industri Manufaktur Lainnya 3) Infrastruktur a) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan b) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPMPTSP Kab.Tanah Laut
	C Fasilitasi Promosi Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPMPTSP Kab.Tanah Laut
	D Pameran dan Sarana Promosi 1) Pameran a) Penyusunan Program dan Monitoring b) Penyelenggaraan dan Evaluasi 2) Media Cetak a) Materi Promosi b) Publikasi dan Distribusi 3) Media Elektronik a) Materi Promosi b) Pelayanan Informasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
5	KERJASAMA PENANAMAN MODAL A Kerjasama Bilateral dan Multilateral B Kerjasama Regional C Kerjasama Dunia Usaha Internasional D Kerjasama BUMD 1) Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMD 2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD berjalan 3) Dokumen kepengurusan BUMD yang sedang dalam proses 4) Dokumen rahasia perusahaan BUMD 5) BUMD Bidang Keuangan (Bank Kalsel dan BPR BKK) : Data	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPMPTSP Kab.Tanah Laut DPMPTSP Kab.Tanah Laut DPMPTSP Kab.Tanah Laut DPMPTSP Kab.Tanah Laut
6	PELAYANAN PENANAMAN MODAL A Pelayanan Aplikasi 1) Aplikasi Sektor Primer dan Tersier 2) Aplikasi Sektor Sekunder B Pelayanan Perizinan 1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka 2) Perizinan Sektor Sekunder a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam b) Industri Kimia dan Barang Kimia c) Industri Aneka	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPMPTSP Kab.Tanah Laut DPMPTSP Kab.Tanah Laut
7	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL A Pemantauan Penanaman Modal	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	DPMPTSP Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	B Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Kab.Tanah Laut	DPMPTSP Kab.Tanah Laut
	C Fasilitas Penyelesaian Masalah	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	D Pengawasan Penanaman Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	
	E Pencabutan / Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	Terbatas	Eselon III		
	F Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP di Bidang	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPMPTSP Kab.Tanah Laut
	VI	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			
1	KEBIJAKAN Kebijakan dibidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
2	TATA LINGKUNGAN				
	A Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1) Invetarisasi, penerapan ekoregion dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan (a) Dokumentasi inventarisasi (b) Pedoman Inventarisasi (c) Penetapan Ekoregion (d) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Provinsi (e) Pedoman penyusunan RPPLH Provinsi (f) Rencana pengawasan waktu/kegiatan oleh PPLHD 2) Evaluasi pemanfaatan sumber daya alam (a) Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam (b) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
	B Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	DPRKPLH

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
3	1) Evaluasi penerapan 2) Perencanaan lingkungan hidup C Ekonomi Lingkungan 1) Perencanaann (a) Valuasi ekonomi (b) Internalisasi lingkungan 2) Insentif dan pendanaan lingkungan D Dampak Lingkungan 1) Bimtek dampak lingkungan 2) Penerapan sistem kajian dampak lingkungan (a) Penilaian dokumen lingkungan (b) Pemeriksaan dokumen lingkungan 3) Evaluasi dan tindak lanjut (a) Rencana detail hasil AMDAL	Biasa/Terbuka	Eselon IV	mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	Kab.Tanah DPRKPLH Kab.Tanah
	(b) Evaluasi (c) Tindak lanjut	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
		Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
	PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN A Pemantauan dan Pengawasan 1) Manufaktur, prasarana dan jasa (a) Industri kimia (b) Industri logam, elektronik dan mesin (c) Aneka industri (d) Prasarana dan jasa 2) Pertambangan, energi, minyak dan gas 3) Agro industri dan usaha skala kecil (a) Peternakan dan perikanan (b) Perkebunan (c) Kehutanan dan hortikultura (d) Usaha skala kecil 4) Udara sumber bergerak (a) Transportasi air dan udara	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
4	(b) Transportasi darat (c) Transportasi kereta api dan kendaraan berat B Evaluasi dan Pengembangan 1) Manufaktur, prasarana dan jasa (a) Industri kimia (b) Industri logam, elektronik dan mesin (c) Aneka industri (d) Prasarana dan jasa 2) Pertambangan, energi, minyak dan gas 3) Agro industri dan usaha skala kecil (a) Peternakan dan perikanan (b) Perkebunan (c) Kehutanan dan hortikultura (d) Usaha skala kecil 4) Udara sumber bergerak (a) Transportasi air dan udara (b) Transportasi darat (c) Transportasi kereta api dan kendaraan berat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
	PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM A Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan 1) Pengembangan (a) Sumber daya genetik (b) Keamanan hayati 2) Pemanfaatan (a) Sumber daya genetik 3) Pengelolaan sumber daya genetik (a) Pengembangan dan pemanfaatan (b) Pemantauan dan pengawasan 4) Keamanan hayati (a) Pengembangan dan pengelolaan (b) Pengembangan dan pengawasan 5) Pengendalian kerusakan lahan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(a) Lahan budidaya (b) Lahan non budidaya				
	B Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
	1) Kerusakan ekosistem				
	(a) Sungai				
	(b) Kerusakan ekosistem				
	(c) Pengelolaan kualitas air				
	2) Danau				
	(a) Pengendalian kerusakan ekosistem				
	(b) Pengelolaan kualitas air				
	3) Rawa				
	(a) Rawa gambut				
	(b) Rawa bukan gambut				
	C Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
	1) Pencegahan				
	2) Penanggulangan				
	3) Pemulihan				
	D Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
	1) Perangkat mitigasi				
	2) Inventarisasi emisi gas rumah kaca				
	(a) Laporan inventarisasi GRK nasional				
	(b) Data bidang inventarisasi GRK				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
5	3) Pengendalian bahan perusak ozon (a) Surat rekomendasi kepada importir terdaftar dan bahan perusak ozon (b) Hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan lapisan ozon 4) Pengendalian kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
	E Adaptasi Perubahan Iklim 1) Perangkat adaptasi perubahan iklim (a) Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim (b) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim 2) Kerentanan perubahan iklim (a) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim (b) Media kliring kerentanan perubahan iklim				
	PENGELOLAAN B3, LIMBAH DAN SAMPAH A Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 1) Registrasi dan notifikasi (a) Registrasi (b) Notifikasi 2) Pemantauan (a) Sektor industri (b) Sektor non industri 3) Evaluasi dan tindak lanjut (a) Sektor industri (b) Sektor non industri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
	B Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 1) Pengumpulan dan pemanfaatan 2) Pengangkutan dan pengolahan 3) Penimbunan dan dumping 4) Notifikasi dan rekomendasi limbah lintas batas (a) Notifikasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
6	(b) Rekomendasi limbah lintas batas				
	C Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah Laut
	1) Pemantauan (a) Pertambangan, energi dan minyak, gas (b) Manufaktur (c) Argoindustri (d) Prasana, jasa dan Non institusi				
	2) Tanggap darurat dan pemulihan kontaminasi (a) Pertambangan, energi dan minyak, gas (b) Manufaktur (c) Argoindustri (d) Prasarana, jasa dan Non Institusi				
	D Pengelolaan Sampah 1) Pembatasan sampah 2) Daur ulang dan pemanfaatan sampah 3) Pembentukan dewan adipura 4) Penetapan pemenang adipura	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
6	HUKUM LINGKUNGAN				
	A Hukum Administrasi Lingkungan 1) Pengelolaan dan pengembangan pengaduan (a) Pengelolaan pengaduan (b) Pengembangan pengaduan 2) Penataan hukum administrasi lingkungan (a) Penerapan hukum administrasi lingkungan (b) Pengembangan hukum administrasi lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
	B Penyelesaian sengketa lingkungan 1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	DPRKPLH Kab.Tanah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
7	(a) Administrasi Gugatan (b) Gugatan 2) Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan (a) Kerugian negara dan masyarakat (b) Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup C Penegakan Hukum Pidana Lingkungan 1) Penyidikan perkara yang sedang ditangani oleh PPHSCH (a) Administrasi penyidikan (b) Pelaksanaan penyidikan 2) Koordinasi penuntunan, evaluasi dan tindak lanjut (a) Koordinasi penuntunan (b) Evaluasi dan tindak lanjut 3) Koordinasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	Terbatas	Eselon III	tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
	KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A Komunikasi Lingkungan 1) Pengembangan Komunikasi (a) Program komunikasi (b) Evaluasi komunikasi 2) Publikasi dan kampanye (a) Publikasi (b) Kampanye	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
	B Penguatan Inisiatif Masyarakat 1) Komunitas pendidikan lingkungan (a) Pengembangan dan bimbingan (b) Evaluasi 2) Kearifan lingkungan (a) Inventarisasi (b) Revitalisasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
8	C Peningkatan Peran Masyarakat 1) Masyarakat perkotaan (a) Masyarakat kawasan permukiman (b) Masyarakat kawasan rentan 2) Masyarakat Pedesaan (a) Masyarakat petani (b) Masyarakat nelayan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
	D Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan 1) Organisasi sosial dan masyarakat 2) Organisasi profesi dan dunia usaha	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
	PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS A Data dan Informasi Lingkungan 1) Pengelolaan data (a) Pengumpulan dan pengelolaan data (b) Manajemen basis data 2) Pengelolaan Informasi (a) Analisis data dan penyajian informasi (b) Perpustakaan 3) Pengembangan Perangkat Lunak (a) Pengembangan instrumen layanan informasi (b) Pengembangan instrumen analisis data 4) Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Jaringan (a) Pengembangan sistem jaringan (b) Pemeliharaan jaringan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
	B Kelembagaan Lingkungan 1) Kelembagaan dan tata laksana (a) Pengembangan kelembagaan (b) Tata laksana 2) Fasilitatif standar pelayanan minimal (a) Fasilitasi standar pelayanan minimal daerah Provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(b) Fasilitasi standar pelayanan minimal daerah Kabupaten/ Kota C Standarisasi dan Teknologi 1) Standarisasi manajemen dan pengujian lingkungan (a) Perangkat manajemen lingkungan (b) Pengujian lingkungan 2) Standarisasi kompetensi keahlian dan lembaga penyedia jasa lingkungan (a) Kompetensi keahlian lingkungan (b) Kompetensi lembaga penyedia jasa lingkungan 3) Teknologi ramah lingkungan (a) Pengembangan kriteria teknologi ramah lingkungan (b) Verifikasi teknologi ramah lingkungan D Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan 1) Pemantauan dan kajian kualitas lingkungan (a) Pemantauan kualitas lingkungan (b) Kajian kualitas lingkungan 2) Laboratorium rujukan dan pengujian (a) Laboratorium rujukan (b) Laboratorium pengujian dan kalibrasi 3) Hasil uji laboratorium lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPRKPLH Kab.Tanah
VII	URUSAN PERINDUSTRIAN				
1	SARANA DAN PRASARANA Meliputi pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DTKP Kab.Tanah Laut
2	PENINGKATAN PRODUKSI Meliputi bahan baku, bahan penolong, bahan penunjang dan teknologi tepat guna	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DTKP Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
3	PEMBINAAN , PENGEMBANGAN, PENYULUHAN DAN MONITORING PERINDUSTRIAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DTKP Kab.Tanah Laut
4	BANTUAN a. Modal/dana rangsangan bagi kelompok industri dan kerajinan rakyat b. Peralatan industri dan kerajinan c. Konsultan/Tenaga ahli	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DTKP Kab.Tanah Laut
5	DAFTAR INVENTARISASI MENURUT JENIS INDUSTRI Meliputi industri berat, industri sandang, industri ringan, industri logam, industri sedang, indsutri pangan, industri obat - obat dan aneka industri lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DTKP Kab.Tanah Laut
6	STANDAR MUTU HASIL PRODUKSI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerjaKab.Tanah Laut	DTKP Kab.Tanah Laut
7	PENGAJUAN HAK MEREKA, CIPTA, PATEN, DESAIN YANG MASIH DALAM PROSES KEMENKUMHAM	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DTKP Kab.Tanah Laut
8	PEMASARAN HASIL PRODUKSI Meliputi promosi hasil, perlindungan hasil industri, penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DTKP Kab.Tanah Laut
9	DATA DAN STATISTIK BIDANG PERINDUSTRIAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DTKP Kab.Tanah Laut
VIII	URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
1	KEBIJAKAN Kebijakan penanggulangan bencana meliputi kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPBD Kab.Tanah Laut
2	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN A Pengurangan Resiko Bencana 1) Pencegahan (a) Pengkajian resiko (b) Pengelolaan Resiko 2) Mitigasi (a) Mitigasi struktur (b) Mitigasi Non struktur B Pemberdayaan Masyarakat 1) Peran lembaga usaha (a) Usaha padat modal (b) Usaha padat karya 2) Peran organisasi sosial masyarakat (a) Organisasi internasional (b) Organisasi sosial masyarakat internasional 3) Peran masyarakat (a) Peningkatan kesadaran masyarakat (b) Peningkatan ketahanan masyarakat C Kesiapsiagaan 1) Peringatan dini (a) Pemaduan sistem jaringan (b) Pemantauan dan peringatan (c) Peta rawan bencana 2) Perencanaan siaga (a) Kebutuhan dan potensi sumber daya (b) Penerapan rencana strategis 3) Penyiapan sumber daya (a) Penyediaan dan penyiapan sumber daya (b) Pengendalian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPBD Kab.Tanah Laut
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPBD Kab.Tanah Laut
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPBD Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
3	<p>PENANGANAN DARURAT</p> <p>A Tanggap Darurat</p> <p>1) Perencanaan darurat</p> <p>(a) Pendataan darurat</p> <p>(b) Perencanaan operasi</p> <p>2) Pengendalian operasi</p> <p>(a) Pengorganisasian pos komando</p> <p>(b) Sarana dan prasarana pos komando</p> <p>3) Penyelamatan dan evakuasi</p> <p>(a) Penyelamatan</p> <p>(b) Evakuasi</p> <p>B Bantuan Darurat</p> <p>1) Bantuan sandang pangan</p> <p>(a) Bantuan sandang</p> <p>(b) Bantuan pangan</p> <p>2) Bantuan kesehatan dan air bersih</p> <p>(a) Bantuan kesehatan</p> <p>(b) Bantuan air bersih</p> <p>3) Bantuan hunian sementara</p> <p>(a) Pembangunan hunian sementara</p> <p>(b) Pendukung hunian sementara</p> <p>C Perbaikan darurat</p> <p>1) Pembersihan lingkungan</p> <p>(a) Penyiapan peralatan</p> <p>(b) Angkutan</p> <p>2) Perbaikan sarana vital</p> <p>(a) Prasarana sosial</p> <p>(b) Prasarana ekonomi</p> <p>3) Pemantauan dan pelaporan</p> <p>(a) Pemantauan</p> <p>(b) Pelaporan</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut</p>	<p>DPBD</p> <p>Kab.Tanah Laut</p> <p>DPBD</p> <p>Kab.Tanah Laut</p> <p>DPBD</p> <p>Kab.Tanah Laut</p>
4	<p>REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI</p> <p>A Penilaian Kerusakan</p> <p>1) Inventarisasi kerusakan</p>	<p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut</p>	<p>DPBD</p> <p>Kab.Tanah Laut</p>

[illegible]

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(b) Relokasi/Pengalihan				
5	LOGISTIK DAN KEDARURATAN				
	A Logistik	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPBD Kab.Tanah Laut
	1) Inventarisasi kebutuhan dan pengadaan				
	(a) Analisis kebutuhan				
	(b) Pengadaan				
	2) Penyimpanan dan distribusi				
	(a) Penyimpanan				
	(b) Distribusi				
	B Peralatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerjaKab.Tanah Laut	DPBD Kab.Tanah Laut
	1) Inventarisasi kebutuhan dan pengadaan				
	(a) Analisis kebutuhan				
	(b) Pengadaan				
	2) Penyimpanan dan pemeliharaan				
	(a) Penyimpanan				
	(b) Pemeliharaan				
	3) Pengerahan dan distribusi				
	(a) Pengerahan				
	(b) Distribusi				
IX	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
1	KEBIJAKAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi,				
2	MONITORING DAN EVALUASI	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
3	KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM				
	A Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	Terbatas	Eselon III		DKUKP Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(1) Organisasi Koperasi dan UKM (a) Organisasi Koperasi (b) Organisasi UKM (2) Badan Hukum Koperasi (a) Penatausahaan Badan Hukum Koperasi (b) Evaluasi Badan Hukum Koperasi (3) Penelaahan Kasus Hukum (a) - Kasus Hukum Koperasi (b) - Kasus Hukum UKM			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	
	B Peraturan Perundang-Undangan (1) Penyusunan dan Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi (a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi (b) Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi (2) Penyusunan dan Evaluasi Perundangan-undangan UKM (a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UKM (b) Evaluasi Perundang-Undangan UKM (3) Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan (a) Produk Peraturan Perundang-Undangan Pusat (b) Peraturan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	C Tata laksana Koperasi dan UKM (1) Tata laksana Koperasi (a) Tata laksana Koperasi Primer (b) Tata laksana Koperasi Sekunder (2) Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah (a) Tata laksana Usaha Kecil (b) Tata laksana Usaha Mengah (3) Klasifikasi Koperasi dan UKM (a) Klasifikasi Koperasi (b) Klasifikasi UKM	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	D Keanggotaan Koperasi (1) Partisipasi Usaha dan Permodalan (a) Partisipasi Usaha (b) Partisipasi Permodalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut

[illegible]

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<div>(a) Tanaman Semusim dan Rempah - rempah</div> <div>(b) Tanaman Keras</div> <div>3) Sarana</div> <div>(a) Sarana Produksi</div> <div>(b) Sarana Pengolahan</div> <div>C Perikanan dan Peternakan</div> <div>1) Perikanan</div> <div>(a) Perikanan Tangkap/Perikanan Laut</div> <div>(b) Perikanan Budidaya/Perikanan Darat</div> <div>2) Peternakan</div> <div>(a) Ternak Besar</div> <div>(b) Ternak Kecil</div> <div>3) Sarana</div> <div>(a) Sarana Produksi</div> <div>(b) Sarana Pengolahan</div> <div>(c) Pengolahan Hasil Perikanan</div> <div>(d) Pengolahan Hasil Peternakan</div> <div>D Industri Kerajinan dan Pertambangan</div> <div>1) Industri</div> <div>(a) Sandang, Logam dan Elektronika</div> <div>(b) Pangan, Kimia dan Aneka</div> <div>2) Kerajinan</div> <div>(a) Logam</div> <div>(b) Non Logam</div> <div>3) Pertambangan dan Migas</div> <div>(a) Pertambangan Umum</div> <div>(b) Pertambangan Migas</div> <div>4) Jasa dan Aneka Usaha</div> <div>(a) Jasa</div> <div>(b) Aneka Usaha</div> <div>E Ketenaga Listrikan dan Aneka Usaha</div> <div>1) Ketenaga Listrikan dan Konstruksi</div>	<div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div>	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah</div>	<div>DKUKP Kab.Tanah Laut</div> <div>DKUKP Kab.Tanah Laut</div> <div>DKUKP Kab.Tanah Laut</div>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
5	(a) Listrik (b) Konstruksi 2) Aneka Usaha (a) Jasa Umum (b) Angkutan 3) Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (a) Pariwisata (b) Pos dan Telekomunikasi			Kab.Tanah Laut	
	PEMBIAYAAN A Program Pendanaan (1) Program Pendanaan Jangka Pendek (a) Program Pendanaan Koperasi Jangka Pendek (b) Program Pendanaan UKM Jangka Pendek (2) Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang (a) Program Pendanaan Koperasi Jangka Menengah dan (b) Program Pendanaan UKM Jangka Menengah dan (3) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir (a) Program Pendanaan Usaha Mikro (b) Program Pendanaan Dana Bergulir	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi PemerintahKab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	B Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam (1) Pengembangan dan Pengendalian KSP (a) Pengembangan Kelembagaan KSP (b) Pengendalian Kelembagaan KSP (2) Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi (a) Pengembangan USP Koperasi (b) Pengendalian USP Koperasi (3) Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM (a) Pengembangan USP-LKM (b) Pengendalian USP-LKM	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi PemerintahKab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	C Urusan Permodalan (1) Pengembangan Permodalan Sendiri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	DKUKP Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(a) Permodalan Sendiri Koperasi (b) Permodalan Sendiri UKM (2) Pengembangan Permodalan Luar (a) Permodalan Bank (b) Permodalan Non Bank (3) Pengembangan Kredit Program (a) Kredit Program Bank (b) Kredit Program Non Bank			mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	
	D Asuransi dan Jasa Keuangan (1) Asuransi (a) Asuransi Koperasi (b) Asuransi UKM (2) Perpajakan (a) Perpajakan Koperasi (b) Perpajakan UKM (3) Jasa Keuangan dan Kredit Komersial (a) Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank (b) Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	E Pembiayaan dan Penjaminan Kredit (1) Lembaga Pembiayaan (a) Modal Ventura (b) Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang (2) Penjamin Kredit (a) Penjamin (b) Asuransi Kredit (3) Pasar Modal (a) Obligasi (b) Modal Penyertaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	F Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB) (1) Pengembangan Potensi Pemasaran (a) Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi (b) Pengembangan Potensi Pemasaran UKM	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
6	G Data Keuangan IKM (Industri Kecil Menengah)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA	Terbatas	Esleon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	A Kemitraan dan Jaringan Usaha (1) Kemitraan (a) Kemitraan Koperasi (b) Kemitraan UKM (2) Jaringan Usaha (a) Jaringan Usaha Koperasi (b) Jaringan Usaha UKM (3) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan (a) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan Koperasi (b) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan UKM				
7	B Informasi dan Publikasi Bisnis (1) Pengumpulan Informasi (a) Pengumpulan Informasi Koperasi (b) Pengumpulan Informasi UKM (2) Pengolahan Informasi (a) Pengolahan Informasi Koperasi (b) Pengolahan Informasi UKM (3) Publikasi dan Promosi (a) Publikasi dan Promosi Koperasi (b) Publikasi dan Promosi UKM	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	A. Pengembangan Kewirausahaan (1) Lembaga Kewirausahaan (a) - Pengembangan Jaringan Kewirausahaan (b) - Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan (2) Penumbuhan Kewirausahaan				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(a) - Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan (b) - Evaluasi Kewirausahaan (3) Sosialisasi Kewirausahaan (a) - Perangkat Lunak (b) - Promosi Kewirausahaan				
	B Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM (1) Diklat Formal dan Informal (a) Diklat Formal (b) Diklat Informal (2) Diklat Non Formal (a) Perangkat Lunak (b) Sarana dan Prasarana Diklat (3) Kerjasama Lembaga Diklat (a) Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah (b) Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	C Peran Serta Masyarakat (1) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap (a) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap (b) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap UKM (2) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan (a) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi (b) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap UKM (3) Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi (a) Dukungan Organisasi Profesi terhadap Koperasi (b) Dukungan Organisasi Profesi terhadap UKM	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	D Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM (1) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM (a) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
8	(b) Monitoring dan Evaluasi Diklat UKM (2) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal (a) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal (b) Monitoring dan Evaluasi Diklat Informal (3) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat (a) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah (b) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Non	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA				
	A. Produktifitas dan Mutu (1) Produktifitas (a) - Inkubator Teknologi (b) - Pengembangan Klaster (2) Peningkatan Mutu (a) - Disain (b) - Standarisasi (3) Sertifikasi Produk (a) - Sertifikasi (b) - Label dan Merek				
	B Restrukturisasi Usaha (1) Restrukturisasi Manajemen (a) - Manajemen Koperasi (b) - Manajemen UKM (2) Restrukturisasi Pendanaan (a) - Pendanaan Koperasi (b) - Pendanaan UKM (3) Restrukturisasi Kelembagaan (a) - Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi (b) - Restrukturisasi Kelembagaan UKM	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	C Fasilitasi Investasi UKMK (1) Investasi Klaster UKMK (a) Fasilitasi Investasi UKMK Agro Bisnis (b) Fasilitasi Investasi UKMK Non Agro Bisnis (2) Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
9	(a) Pengembangan Pangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	(b) Pengembangan Non Pangan				
	(3) Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK				
	(a) Fasilitas Investasi Usaha Koperasi				
	(b) Fasilitas Investasi Usaha UKM				
	PENGAJIAN SUMBER DAYA UKMK				
	A Penelitian Koperasi				
	(1) Perencanaan dan Pengendalian				
	(a) Perencanaan				
	(b) Evaluasi dan Pelaporan				
	(2) Penyelenggaraan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	(a) Kelembagaan Koperasi				
	(b) Bisnis Koperasi				
	(3) Tata Laksana Penelitian				
	(a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi				
	(b) Sarana dan Prasarana				
	B Penelitian UKM				
	(1) Perencanaan dan Pengendalian				
	(a) Perencanaan				
	(b) Evaluasi dan Pelaporan				
	(2) Penyelenggaraan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
	(a) Kelembagaan UKM				
	(b) Bisnis UKM				
	(3) Tata Laksana Penelitian				
	(a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi				
	(b) Sarana dan Prasarana				
	C Penelitian Sumber Daya				
	(1) Perencanaan dan Pengendalian				
	(a) Perencanaan				
	(b) Evaluasi dan Pelaporan				
	(2) Penyelenggaraan				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(a) Sumber Daya Manusia (b) Pembiayaan (3) Tata Laksana Penelitian (a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi (b) Sarana dan Prasarana D Pengembangan Perkaderan UMK (1) Penyuluhan (a) Penyelenggaraan (b) Materi Penyuluhan (2) Perkaderan (a) Penilaian (b) Pengembangan (3) Kerja Sama dan Jaringan (a) Lembaga Pemerintah (b) Lembaga Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DKUKP Kab.Tanah Laut
X	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	KEBIJAKAN Kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Biasa.Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPPPA Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
2	PENGARUSUTAMAAN GENDER, EKONOMI, POLITIK SOSIAL DAN HUKUM A Data Gender B Advokasi dan Fasilitasi C Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Gender	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPPPA Kab.Tanah Laut
3	PERLINDUNGAN PEREMPUAN (KEKERASAN, MASALAH SOSIAL, TENAGA KERJA, KORBAN PERDAGANGAN) A Data Perlindungan Perempuan B Advokasi dan Fasilitasi C Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Perempuan D Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender E Analisis dan Penyajian Informasi Gender	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPPPA Kab.Tanah Laut DPPPA Kab.Tanah Laut DPPPA Kab.Tanah Laut
4	PERLINDUNGAN ANAK (HAK SIPIL, MASALAH SOSIAL, KEKERASAN TERHADAP ANAK, ANAK BERKEBUTUHAN) A Data Perlindungan Anak B Advokasi dan Fasilitasi C Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Anak	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPPPA Kab.Tanah Laut
5	IDENTITAS SAKSI DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPPPA Kab.Tanah Laut
6	IDENTIFIKASI ANAK BERMASALAH DENGAN HUKUM	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPPPA Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
7	IDENTIFIKASI SAKSI, PELAKU, PELAPOR DAN SAKSI AHLI	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPPPA Kab.Tanah Laut
8	TEMPAT PERLINDUNGAN KORBAN	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPPPA Kab.Tanah Laut
9	TUMBUH KEMBANG ANAK (PENDIDIKAN, KESEHATAN, PARTISIPASI, LINGKUNGAN DAN PENANAMAN NILAI) A Data Tumbuh Kembang Anak B Advokasi dan Fasilitasi C Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Tumbuh Kembang Anak	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab.Tanah Laut	DPPPA Kab.Tanah Laut
XI	URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
1	Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
2	Pengembangan destinasi pariwisata A. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata (1) Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata) (2) Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(3) Pengembangan Zona Kreatif (a) Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya (b) Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
	(4) Invetasi Pariwisata (a) Pengembangan Potensi Investasi (b) Promosi Investasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
	(5) Pengembangan Objek Vital Nasional	Terbatas	Eselon III		DISPAR Kab.Tanah Laut
	B. Pengembangan Daya Tarik Wisata (1) Bimtek Daya Tarik Wisata (2) Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata (3) Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota Pusaka (4) Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan (5) Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
	C. Industri Pariwisata (1) Sarana Pariwisata (a) usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
	(b) penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
	(c) Sertifikasi kelembagaan dan SDM industri pariwisata	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
	(d) Pengawasan industri pariwisata	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
	(2) Jasa Pariwisata:	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	DISPAR

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(a) jasa transportasi wisata (b) jasa informasi pariwisata (c) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi (d) jasa perjalanan wisata (e) jasa konsultan pariwisata (f) jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan (g) insentif (h) konvensi (i) pameran (3) Pengembangan Produk dan Pelayanan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Kab.Tanah DISPAR Kab.Tanah
	D. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata (1) Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat E. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event (1) Pengembangan Wisata Kulier dan Belanja (2) Pengembangan Rekreasi dan Hiburan (a) Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan (b) Pengembangan Wisata Olah Raga (3) Pengembangan Wisata Alam dan Budaya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PemerintahanKab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
3	PEMASARAN PARIWISATA				
	A. Pengembangan pasar dan informasi pariwisata (1) Informasi Pasar Dalam Negeri (a) Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri (b) Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri (2) Informasi Pasar Luar Negeri (a) Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri (b) Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri (3) Hubungan Lembaga Pariwisata dan (a) Hubungan Lembaga Pariwisata (4) Perancangan Pemasaran Pariwisata (a) Perancangan Pemasaran Dalam Negeri (b) Perancangan Pemasaran Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	B. Promosi pariwisata luar negeri (1) Wilayah ASEAN (2) Wilayah Asia (3) Wilayah Eropa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
	C. Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
	D. Pencitraan Indonesia (1) Strategi Pencitraan Indonesia (a) Perencanaan Pencitraan Indonesia (2) Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang (a) Promosi Media (b) Sarana dan Distribusi Media (3) Kerjasama dan Kemitraan (a) Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah (b) Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Non-Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
	E. Promosi Konvensi, Insentif, event, dan minat khusus (3) Promosi Minat Khusus (a) Wisata Bahari (b) Wisata Non Bahari	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
	4 EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA A. Pengembangan industri Perfilman (1) Fasilitas Industri Perfilman (a) Fasilitas Usaha Perfilman (b) Fasilitas Kegiatan Perfilman	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
	(2) Festival dan Eksibisi Film (a) Festival Film (3) Produksi (a) Pelayanan Produksi Film				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
5	(4) Pemasaran Film (a) Pertunjukan Film	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
	B. Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik (1) Pengembangan Seni Pertunjukan (a) Kreasi dan Produksi Seni Pertunjukan (b) Fasilitasi Pengembangan Seni Pertunjukan (2) Pengembangan Industri Musik (a) Kreasi dan Produksi Musik (b) Fasilitasi Pengembangan Industri Musik (3) Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik				
	C. Pengembangan Seni Rupa (1) Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan, Fotografi (a) Kreasi dan Produksi Karya Seni (b) Fasilitasi Pengembangan Seni (2) Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi (b) Apresiasi Karya Seni Rupa				
	A. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media (1) Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video (2) Pengembangan Karya Kreatif Periklanan (a) Iklan Cetak (b) Iklan Elektronik	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
	B. Desain dan Arsitektur (1) Komunikasi Visual (a) Komunikasi Visual (2) Desain Produk dan Kemasan (3) Mode (a) Desain Busana (b) Desain Non Busana	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
6	C. Kerjasama dan Fasilitasi (1) Lisensi Teknologi (a) Pemanfaatan Teknologi (2) Sentra Inovasi dan (a) Pengembangan Sentra Inovasi (3) Sentra Kreatif (a) Pengelolaan Sentra Kreatif (4) Akses Pembiayaan (a) Akses Pembiayaan Non Bank (b) Akses Pembiayaan Non Bank	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
	A. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata (1) Program dan Evaluasi (2) Data dan Publikasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
	B. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif (1) Program dan Evaluasi (2) Data dan Publikasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
	C. Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (1) Program dan Evaluasi (2) Penyelenggaraan dan Kerjasama	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
	D. Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (1) Program dan Evaluasi (2) Evaluasi dan Kerjasama	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISPAR Kab.Tanah
XII 1	URUSAN SOSIAL Kebijakan Kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut

[illegible]

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
3	D Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA 1) Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	2) Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi	Terbatas		Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	
	E Pelayanan sosial lanjut usia				
	1) Pelayanan sosial dalam dan luar panti	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	2) Pengembangan kelembagaan a. Pembinaan lembaga b. Kerjasama lembaga	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	3) Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	Perlindungan dan Jaminan Sosial				
	A Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial 1) Bimbingan dan standardisasi 2) Perizinan dan pengumpulan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	B Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran				
	C Perlindungan sosial korban bencana sosial 1) Ketahanan sosial masyarakat a. Keserasian sosial b. Penguatan sumber daya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	2) Tanggap darurat a. Bantuan darurat b. Advokasi sosial	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	3) Pemulihan sosial a. Penguatan sosial b. Reintegrasi sosial	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	4) Kerjasama a. Kerjasama Pemerintah b. Kerjasama Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	D Perlindungan sosial korban bencana alam 1) Kesiapsiagaan dan mitigasi 2) Tanggap darurat	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
4	a. Bantuan darurat b. Advokasi sosial 3) Pemulihan sosial dan penguatan sosial 4) Kerjasama a. Kerjasama Pemerintah b. Kerjasama Non Pemerintah E Jaminan sosial 1) Seleksi dan verifikasi 2 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan a. Pendampingan b. Penyaluran 3) Kerjasama a. Kerjasama Pemerintah b. Kerjasama Non Pemerintah	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	2 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan a. Pendampingan b. Penyaluran	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	3) Kerjasama a. Kerjasama Pemerintah b. Kerjasama Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan A Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial 1) Ketahanan keluarga a. Bimbingan kesejahteraan sosial keluarga b. Konsultasi dan Advokasi keluarga 2) Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial 3) Kemitraan dunia usaha a. Kerjasama b. Bimbingan sosial 4) Karang taruna a. Kelembagaan b. Pengembangan kapasitas	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Prov. Kalsel Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	B Pemberdayaan komunitas adat terpencil 1) Persiapan pemberdayaan a. Identifikasi b. Analisis 2) Pemberdayaan sumber daya manusia a. Pemberdayaan sumber daya manusia adat terpencil b. Pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut Dinas Sosial Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	terpencil				
	3) Penggalian dan pengembangan potensi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	a. Penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan				
	b. Pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan				
	4) Kesorasian dan penguatan komunikasi adat terpencil	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	a. Kesorasian sosial				
	b. Penguatan sosial				
	5) Kerjasama kelembagaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	a. Kerjasama kelembagaan				
	b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan				
C	Penanggulangan kemiskinan perkotaan dan perdesaan				
	1) Identifikasi dan analisis	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	2) Pengembangan kapasitas	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	a. Pengembangan kapasistas sumber daya manusia				
	b. Pengembangan kapasitas usaha				
D	Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial				
	1) Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	a. Pengangkatan				
	b. Penghargaan				
	c. Kesejahteraan				
	2) Pelestarian nilai - nilai kepahlawanan dan keperintisan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	a. Identifikasi				
	b. Pendayagunaan				
	3) Pengembangan kesetiakawanan sosial	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	a. Penggalian nilai				
	b. Pelestarian nilai				
	4) Pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Sosial Kab.Tanah Laut
	a. Pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama				
	b. Standardisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
XIV	URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI				
	A. PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut
	B. PERENCANAAN TENAGA KERJA 1. Perencanaan Tenaga Kerja Makro a. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut
	2. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro a. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah 1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga 3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga b. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta 1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Swasta 2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga 3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut
	C. PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS 1. Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	DISNAKERTRANS

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<p>a. Pengembangan Standarisasi Kompetensi</p> <p>1) Penerapan Standar Kompetensi</p> <p>2) Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi</p> <p>3) Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan</p> <p>Program Pelatihan Ketenagakerjaan</p> <p>Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan</p> <p>4) Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan</p> <p>Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan</p> <p>Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan</p> <p>5) Pengembangan Program Pelatihan Ketrasmigrasian</p> <p>Program Pelatihan Ketrasmigrasian</p> <p>Penyusunan Materi Pelatihan Ketrasmigrasian</p> <p>b. Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja</p> <p>1) Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan</p> <p>Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja</p> <p>Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan</p> <p>2) Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan</p> <p>Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan</p> <p>Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas</p>			<p>mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>Kab.Tanah Laut</p>
	<p>3) Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan</p> <p>Standar Mutu Lembaga Pelatihan</p> <p>Bimbingan Penerapan Standar Mutu</p> <p>4) Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga</p> <p>Sistem Pendanaan Pelatihan Kerjasama Antar Lembaga</p> <p>c. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan</p> <p>1) Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah</p> <p>Lembaga Pelatihan Pemerintah</p> <p>Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga</p>	<p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<div><div>2) Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta Pengembangan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta</div><div>3) Tenaga Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan</div><div>4) Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan Penyebaran Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan</div><div>d. Bina Pemagangan<div>1) Pemagangan Dalam Negeri Program Pemagangan Dalam Negeri Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri</div><div>2) Pemagangan Luar Negeri Program Pemagangan Luar Negeri Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Luar Negeri</div><div>3) Perizinan dan Advokasi Pemagangan Perizinan dan Rekomendasi Advokasi dan Perlindungan</div><div>4) Promosi dan Jenjang Pemagangan Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan Pemagangan Jejaring Pemagangan</div></div></div>				
	<div>e. Produktivitas dan Kewirausahaan<div>1) Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan Promisi Produktivitas dan Kewirausahaan Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan</div></div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	2) Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas Sistem dan Metode Produktivitas Alat dan Teknik Peningkatan Produktivitas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut
	3) Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas Pengukuran Produktivitas Kajian Produktivitas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut
	4) Pengembangan Kewirausahaan Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Bimbingan Konsultasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PemerintahKab.Tanah Laut	DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut
	5) Transmigrasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut
	6) Nama dan alamat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berkerja pada Perusahaan di Kalimantan Selatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut
	D. PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA				
	1. Pengembangan Pasar Kerja				
	a. Informasi Pasar Kerja				
	1) Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri				
	2) Informasi Pasar Kerja Luar Negeri				
	b. Analisis Pasar Kerja				
	1) Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri				
	2) Analisis Pasar Kerja Luar Negeri				
	c. Bursa Kerja				
	1) Bursa Kerja Dalam Negeri				
	2) Bursa Kerja Luar Negeri				
	d. Analisis Jabatan				
	1) Analisis dan Informasi Jabatan				
	2) Pengembangan Sistem Analisis Jabatan				
	2. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri				
	a. Antar Kerja				
	1) (AKAD) /Antar Kerja Lokal (AKL)				
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	2) Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja				
	<div><div>b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus<div>1) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita</div><div>2) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia</div></div><div>c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan<div>1) Penyuluhan Jabatan</div><div>2) Bimbingan Jabatan</div></div><div>d. Pemberdayaan Pengantar Kerja<div>1) Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja</div><div>2) Kerjasama antar Lembaga</div></div></div> <div>3. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri<div>a. Kelembagaan Penempatan<div>1) Perizinan Kelembagaan</div><div>2) Evaluasi Kinerja</div></div><div>b. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)<div>1) Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI</div><div>2) Fasilitasi Penyediaan TKI</div></div><div>c. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia<div>1) Advokasi dan Kepulangan</div><div>2) Sarana dan Perlindungan</div></div><div>d. Kerjasama Internasional<div>1) Kerjasama Bilateral</div><div>2) Kerjasama Regional dan Multilateral</div></div></div>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut
	<div>4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal<div>a. Tenaga Kerja Mandiri dan Sektor Informal<div>1) Tenaga Kerja Mandiri</div><div>2) Tenaga Kerja Sektor Informal</div></div><div>b. Pengembangan Padat Karya<div>1) Padat Karya Perdesaan</div><div>2) Padat Karya Perkotaan</div></div><div>c. Terapan Teknologi Tepat Guna</div></div>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<div>1) Pengembangan Teknologi Tepat Guna</div> <div>2) Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna</div> <div>d. Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga</div> <div>1) Pemberdayaan Pendampingan</div> <div>2) Kerjasama Antar Lembaga</div> <div>5. Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing</div> <div>a. Analisis dan Perizinan Sektor Industri</div> <div>1) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri</div> <div>2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri</div> <div>b. Analisis dan Perizinan Sektor Jasa</div> <div>1) Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa</div> <div>2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa</div> <div>c. Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan</div> <div>1) Pengendalian</div> <div>2) Kerjasama Kelembagaan</div> <div>6. Standardisasi Profesi</div> <div>a. Sistem Informasi dan Registrasi</div> <div>1) Dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi dan registrasi</div> <div>2) Dokumen yang berhubungan dengan Sertifikasi kompetensi kerja</div> <div>b. Pembakuan Akreditasi</div> <div>1) Dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dan</div> <div>2) Dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan</div>	<div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div>	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</div>	<div>DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut</div> <div>DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut</div>
E. PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL					

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<p>TENAGA KERJA</p> <p>1. Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi</p> <p>a. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama</p> <p>1) Peraturan Perusahaan</p> <p>2) Perjanjian Kerja Bersama</p> <p>b. Perjanjian Kerja</p> <p>c. Kesejahteraan Pekerja</p> <p>1) Program Kesejahteraan</p> <p>2) Fasilitas Kesejahteraan</p> <p>d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja</p> <p>1) Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja</p> <p>2) Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja</p> <p>2. Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial</p> <p>a. Organisasi Pekerja dan Pengusaha</p> <p>1) Organisasi Pekerja</p> <p>2) Organisasi Pengusaha</p> <p>b. Kelembagaan Hubungan Industrial</p> <p>1) Lembaga Kerjasama BIPARTIT</p> <p>2) Lembaga Kerjasama TRIPARTIT</p> <p>c. Pemasyarakatan Hubungan Industrial</p> <p>1) Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial</p> <p>2) Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial</p> <p>3. Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</p> <p>a. Pengupahan</p> <p>1) Usulan penetapan upah minimum Bupati/Walikota kepada Gubernur</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Eselon III</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon III</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Kalsel</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut</p> <p>DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut</p> <p>DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut</p> <p>DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<div>2) Usulan pengguhan pelaksanaan upah minimum dari Dunia Usaha kepada Gubernur</div> <div>3) Penerapan Standar Pengupahan</div> <div>4) Pengurusan Pengupahan</div> <div>b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja</div> <div>1) Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja</div> <div>2) Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja</div> <div>4. Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial</div> <div>a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial</div> <div>1) Pencegahan Dini</div> <div>2) Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan</div> <div>b. Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</div> <div>1) Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial</div> <div>2) Evaluasi dan Pelaporan</div> <div>c. Perselisihan Hubungan Industrial</div> <div>1) Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator,</div> <div>2) Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan</div> <div>F. PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</div> <div>1. Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</div> <div>a. Pengawasan Norma Kerja</div> <div>1) Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat</div> <div>2) Pengawasan Norma Pengupahan</div> <div>b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat</div> <div>1) Pengawasan Norma Hubungan Kerja</div> <div>2) Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat</div> <div>c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga</div>	<div>Terbatas</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon III</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div>	<div>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</div>	<div>DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut</div> <div>DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut</div> <div>DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut</div> <div>DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut</div>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<div>Kerja</div> <div>1) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri</div> <div>2) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri</div> <div>3) Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek</div> <div>2. Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak</div> <div>a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan</div> <div>1) Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi</div> <div>2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan</div> <div>b. Pengawasan Norma Kerja Anak</div> <div>1) Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk</div> <div>2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak</div> <div>c. Kerjasama Lintas Sektor</div> <div>1) Kerjasama Lintas Sektor Tenaga Kerja Perempuan</div> <div>2) Kerjasama Lintas Sektor Tenaga Kerja Anak</div> <div>d. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak</div> <div>1) Advokasi Tenaga Kerja Perempuan</div> <div>2) Advokasi Tenaga Kerja Anak</div> <div>3. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja</div> <div>a. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan</div> <div>1) Pengawasan Norma Mekanik</div> <div>2) Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan</div> <div>b. Penanggulangan Kebakaran</div> <div>1) Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan</div> <div>2) Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran</div>	<div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div>	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</div>	<div>DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut</div> <div>DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut</div>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<div>c. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja<div>1) Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja</div><div>2) Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja</div></div> <div>d. Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya<div>1) Pengawasan Norma Lingkungan Kerja</div><div>2) Pengawasan Norma Bahan Berbahaya</div></div> <div>e. Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3<div>1) Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3</div><div>2) Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3</div></div> <div>4. Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan</div> <div>5. Bina Penegakan Hukum<div>a. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan<div>1) Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan</div><div>2) Penindakan Norma Ketenagakerjaan</div></div><div>b. Penyidikan Norma Ketenagakerjaan<div>1) Teknis Penyidikan Norma Ketenagakerjaan</div><div>2) Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan</div></div><div>c. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil<div>1) Pemberdayaan PPNS</div><div>2) Sarana dan Prasarana PPNS</div></div><div>d. Kerjasama Penegakan Hukum<div>1) Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum</div><div>2) Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan</div></div><div>e. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan (Nota pemerikaan dan BAP)</div></div>	<div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Terbatas</div>	<div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon III</div>	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</div> <div>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut</div>	<div>DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut</div> <div>DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut</div> <div>DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut</div> <div>DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut</div> <div>DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut</div>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	G. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA				
	1. Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut
	a. Pengkajian K3				
	1) Analisis dan Standardisasi bidang K3				
	2) Hasil kajian, perekayasa dan penerapan teknologi				
	b. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3				
	2. Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut
	a. SDM K3				
	1) Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan				
	2) Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				
	b. Kompetensi K3				
	1) Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan				
	2) Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan				
	4) Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				
	5) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				
	H. KETRANSMIGRASIAN				
	1. Perencanaan dan Pemberdayaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISNAKERTRANS Kab.Tanah Laut
	a. Pencadangan areal untuk pemukiman Transmigrasi				
	b. Peta lokasi Transmigrasi				
	c. Data lahan Transmigrasi				
	d. Rencana strategis pembangunan Transmigrasi				
	e. Penyusunan rencana satuan kawasan pengembangan				
	2. Pengembangan kawasan, pengerahan dan penempatan penduduk				
	a. Usulan penempatan Transmigrasi				
	b. Peta lahan Transmigrasi				
	c. Peta lahan eks lokasi Transmigrasi				
	d. Pembangunan infrastruktur lokasi Transmigrasi				
XV	URUSAN KESEHATAN				
1	PERUMUSAN KEBIJAKAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
2	Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit A Pengkajian dan pengusulan kebijakan B Penyiapan bahan C Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan D Pengumpulan dan pengolahan data E Penetapan dalam bentuk nspk dan standarisasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Kab.Tanah Laut
	UPAYA KESEHATAN A Upaya Kesehatan Dasar (1) Pelayanan Kedokteran Keluarga (2) Praktik Klinis Bagi Dokter di Fanyaskes Primer			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut
	(3) Pelaksanaan Kesehatan Primer (4) Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas (5) Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit (6) ICD 10, Destistry & Stomatology (7) Infeksi Menular Lewat Tranfusi Darah (8) Penyakit Mulut di Tingkat Primer (9) Pembiayaan Darah (10)Penggunaan Darah Rasional (11)Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring (12)Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil (13)Akreditasi Puskesmas (14)Puskesmas Berprestasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut
	B Upaya Kesehatan Rujukan (1) Pelayanan Kesehatan Rujukan (a) Rumah Sakit Bergerak (b) Rumah Sakit Pratama (c) Rumah Sakit Publik (d) Rumah Sakit Privat (e) Rumah Sakit Khusus (2) Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium (3) Pelayanan Rumah Sakit Privat (a) Akses Pelayanan SPGDT Call 119 (b) Akses Pelayanan Rekayasa Jaringan dan Sel Punca				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<div>(c) Pelayanan Geriartri</div> <div>(d) Pelayanan Medical Tourism</div> <div>(e) Pelayanan Hyperbarik</div> <div>(4) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan</div> <div> (a) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan</div> <div> (b) Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri</div> <div>(5) Badan Pengawas di Rumah Sakit</div> <div>(6) Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan</div> <div> (a) Usulan Penetapan atau Peningkatan Kelas dari Pemilik RS atau Pimpinan Badan Hukum Rumah Sakit</div> <div> (b) Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi</div> <div> (c) Profil dan data Rumah Sakit 3 (tiga) Tahun Terakhir</div> <div> (d) <i>Self Instrumen Assesment</i> sesuai dengan kelas yang diajukan</div> <div> (e) Keputusan Penetapan Kelasa (Jika peningkatan kelas)</div> <div> (f) SerSertifikat Lulus Akreditasi (Jika Peningkatan Kelas)</div> <div>(7) Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain</div> <div> (a) Akreditasi Rumah Sakit Standar Internasional (JCI)</div> <div> (b) Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional</div> <div> (c) Rumah Sakit Pasca Akreditasi Nasional</div> <div> (d) <i>Surveyor</i> Akreditasi Rumah Sakit</div> <div>C Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan</div> <div> (1) Mikrobiologi dan Imunologi</div> <div> (a) Laboratorium Kseshatan</div> <div> (b) Laboratorium Klinik</div> <div> (c) Laboratorium Puskesmas</div> <div> (d) Laboratorium Mikrobiologi Kultur</div> <div> (2) Patologi dan Toksikologi</div> <div> (a) PNPME</div> <div> (b) Sarana Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)</div> <div> (3) Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</div> <div> (a) Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK</div> <div> (b) Kalibrasi Rumah Sakit</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<div>(c) Kalibrasi Puskesmas</div> <div>(d) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Rumah Sakit</div> <div>(e) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Puskesmas</div> <div>(4) Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK)</div> <div>(a) ASPAK Rumah Sakit</div> <div>(b) ASPAK Puskesmas</div> <div>(c) ASPAK Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota</div> <div>D Kesehatan Jiwa</div> <div>(1) Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan</div> <div>(a) Kesehatan Jiwa di Desa Siaga</div> <div>(b) Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer</div> <div>(c) Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer</div> <div>(2) Etikolegal dan Asesmen</div> <div>(a) Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah Lainnya Terhadap Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa</div> <div>(b) Visum Et Repertum</div> <div>(3) Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko</div> <div>(a) Kesehatan Jiwa Di Sekolah</div> <div>(b) Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial</div> <div>Penanggulangan Bencana</div> <div>(c) Penanggulangan Autisme</div> <div>(d) Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko</div> <div>(e) Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut
3	<div>PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN</div> <div>A Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra</div> <div>(1) Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)</div> <div>(a) Difteri</div> <div>(b) Polio</div> <div>(c) Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS filariasis</div> <div>(d) Surveilans influenza</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<p>(e) Keracunan Pangan</p> <p>(2) Imunisasi</p> <p>(a) Pekan Imunisasi Nasional</p> <p>(b) Coldchain Bagi Petugas Imunisasi</p> <p>(c) Int</p> <p>(d) Imunisasi bagi Petugas Kesehatan</p> <p>(e) Imunisasi di Daerah Sulit</p> <p>(f) Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS)</p> <p>(g) Imunisasi bagi masyarakat umum</p> <p>(h) Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanangan vaksin baru DPT-HIB-Hib</p> <p>(i) Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB B/ Haemophilis Influenza tipe B</p> <p>(4) Kesehatan Matra</p> <p>(a) Mudik Sehat</p> <p>(b) Kesehatan bagi Penumpang Darat, Penumpang Kapal Laut dan Penumpang Pesawat Udara</p> <p>(c) Kesehatan Migran</p> <p>(d) Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik</p> <p>(e) Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas</p> <p>(f) Kesehatan Transmigrasi bagi tenaga kesehatan</p> <p>B Pengendalian Penyakit Menular Langsung</p> <p>(1) Pengendalian Tuberkulosis</p> <p>(a) Pengendalian Penyakit TB</p> <p>(b) TB Multi Drug Resitance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB.</p> <p>(c) Laboratorium TB</p> <p>(2) Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual</p> <p>(a) Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) / <i>Integrated Bio-Behavioural Surveillance</i> (IBBS)</p> <p>(b) <i>Human Immuno Deficiency Virus</i> (HIV)</p> <p>(c) Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<p>Pengobatan (PDP), Konseling dan Test (d) Obat <i>Anti Retro Viral</i> (ARV) dan reagen tes HIV</p> <p>(3) Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut</p> <p>(a) <i>Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus</i> (MERS CoV) (b) Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)</p> <p>(4) Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan (a) Diare (b) Tifoid (c) Hepatitis</p> <p>(5) Pengendalian Kusta dan Frambusia (a) Kusta (b) Frambusia (c) Aliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK)</p> <p>C Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang</p> <p>(1) Pengendalian Malaria (a) Kelambu berinsektisida (LLINs) (b) Eliminasi malaria (c) Crosschecker mikroskopis malaria</p> <p>(2) Pengendalian Arbovirolesi (a) DBD (b) Chikungunya (c) Ebola</p> <p>(3) Pengendalian Zoonosis (a) Penyakit flu burung (b) Vaksin Anti Rabies (VAR) baru (c) Penyakit Pes (d) Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1)</p>				
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<p>(4) Pengendalian Filariasis dan Kecacingan</p> <p>(a) Filariasis</p> <p>(b) Kecacingan</p> <p>(c) Schistosomiasis</p> <p>(5) Pengendalian Vektor</p> <p>D Pengendalian Penyakit Tidak Menular</p> <p>(1) Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah</p> <p>(a) Penyakit Jantung</p> <p>(b) Penyakit Pembuluh darah</p> <p>(c) Penyakit Hipertensi</p> <p>(d) Penyakit Stroke</p> <p>(2) Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik</p> <p>(a) Penyakit Diabetes Mellitus</p> <p>(b) Penyakit gangguan Metabolik</p> <p>(c) Penyakit gangguan Tiroid</p> <p>(d) Gangguan Obesitas</p> <p>(3) Pengendalian Penyakit Kanker</p> <p>(4) Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif</p> <p>(a) Penyakit Akibat produk tembakau</p> <p>(b) Asma, Lupus, Thalassemia</p> <p>(5) Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan</p> <p>(a) Pengendalian Cidera</p> <p>(b) Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas</p> <p>(c) Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan</p> <p>E Penyehatan Lingkungan</p> <p>(1) Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar</p> <p>(a) Pengawasan Kualitas Air Minum</p> <p>(b) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut</p>	<p>Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut</p> <p>Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
4	(2) Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum (a) Higiene sanitasi dan Bangunan Umum (b) Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan (c) Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum (3) Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat (a) Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan (b) Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan (c) Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat (d) Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar (4) Higiene Sanitasi Pangan (a) Makanan Jajanan (b) Restoran / Rumah Makan (c) Jasa Boga (d) Depot Air Minum (5) Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi (a) Medis Fasyankes (b) Limbah Medis (Free Mercury) (c) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (d) Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut
	GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK A Gizi (1) Gizi Makro (a) Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting) (b) Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu) (2) Gizi Mikro (a) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI) (b) Manajemen Taburia (c) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya (3) Gizi Klinik dan Dietetik (a) Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<div>(b) Tatalaksana Anak Gizi Buruk</div> <div>(c) Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih</div> <div>(4) Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan</div> <div>(a) Makanan Pendamping ASI</div> <div>(b) ASI Eksklusif</div> <div>(c) Pedoman Gizi Seimbang</div> <div>(d) Makanan Bayi dan Anak</div> <div>(e) Buffer Stock Makanan Pendamping ASI</div> <div>(f) Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang</div> <div>(g) Makanan Tambahan Anak Sekolah</div> <div>(5) Kewaspadaan Gizi</div> <div>(a) Surveilans Gizi</div> <div>(b) Epidemiologi Kasus Gizi Buruk</div> <div>(c) Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana</div> <div>(d) Jejaring Informasi Pangan dan Gizi</div> <div>B Kesehatan Ibu</div> <div>(1) Kesehatan Ibu Hamil</div> <div>(a) Pelayanan Antenatal Terpadu</div> <div>(b) Pelayanan Kelas Ibu Hamil</div> <div>(c) Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)</div> <div>(2) Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas</div> <div>(a) Kemitraan Bidan dan Dukun</div> <div>(b) Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)</div> <div>(c) Supervisi Fasilitatif</div> <div>(3) Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi</div> <div>(a) Audit Maternal Perinatal</div> <div>(b) Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan Masyarakat</div> <div>(c) Tanda Bahaya pada Kehamilan</div> <div>(d) Surveilans Kematian Ibu</div> <div>(4) Keluarga Berencana</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<div>(a) Pelayanan KB Pasca Persalinan</div> <div>(b) Pelatihan KB Pasca Persalinan</div> <div>(5) Perlindungan Kesehatan Reproduksi</div> <div>(a) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT)</div> <div>(b) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM Kespro)</div> <div>(c) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan</div> <div>(d) Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)</div> <div>C Kesehatan Anak</div> <div>(1) Kelangsungan Hidup Bayi</div> <div>(a) Pelayanan Kesehatan Neonatal</div> <div>(b) Manajemen Asfeksia</div> <div>(c) Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)</div> <div>(d) Pencegahan Infeksi</div> <div>(2) Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah</div> <div>(a) Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang)</div> <div>(b) Rujukan Tumbuh Kembang</div> <div>(c) Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT)</div> <div>(3) Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko</div> <div>(a) Screening Hypotheroid Congenital</div> <div>(b) Surveillance Kesehatan Anak</div> <div>(c) Surveillance Kesehatan Bawaan</div> <div>(4) Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja</div> <div>(a) Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit</div> <div>(b) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja</div> <div>(c) Usaha Kesehatan Sekolah</div> <div>(5) Perlindungan Kesehatan Anak</div> <div>(a) Korban kekerasan terhadap anak</div> <div>(b) Anak dengan disabilitas</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<p>(c) Anak terlantar/anak jalanan di panti</p> <p>(d) Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan</p> <p>(e) Anak kelompok terasing/kelompok minoritas</p> <p>D Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer</p> <p>(1) Kesehatan Tradisional Keterampilan</p> <p>(a) Akupresure</p> <p>(b) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional</p> <p>(c) Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes</p> <p>(d) Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya</p> <p>(2) Kesehatan Tradisional Ramuan</p> <p>(a) Health Tourism</p> <p>(b) Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA)</p> <p>(c) Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)</p> <p>(d) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional</p> <p>(e) Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes</p> <p>(3) Kesehatan Alternatif dan Komplementer</p> <p>(a) Akupunktur</p> <p>(b) Obat Herbal / Obat Tradisional</p> <p>(c) Integrasi Yankestrad</p> <p>(d) Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya</p> <p>(4) Penapisan dan Kemitraan</p> <p>(a) Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan</p> <p>(b) Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional,</p> <p>(c) Penapisan Pengobat Tradisional Asing</p> <p>(d) Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan</p> <p>(e) Pengobat Tradisional (Lokal)</p> <p>(f) Asosiasi Pengobat Tradisional</p> <p>E Kesehatan Kerja dan Olahraga</p> <p>(1) Pelayanan Kesehatan Kerja</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan</p>	<p>Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut</p> <p>Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(a) Penyakit Akibat Kerja (b) Pemeriksaan Kesehatan Pekerja (c) Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) (2) Kapasitas Kerja (a) Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (b) Kapasitas Kesehatan Kerja (c) TP ASI (3) Lingkungan Kerja (a) Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP (b) K3 Perkantoran (c) K3 Rumah Sakit (d) K3 Puskesmas (e) Biomonitoring Efek Kesehatan (f) Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan (4) Kemitraan Kesehatan Kerja (a) Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja (b) Kesehatan nelayan (c) Integrasi pos UKK (d) Kabupaten/kota percontohan (e) Penguatan profesi (5) Kesehatan Perkotaan (a) Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan (b) Forum Kota (6) Kesehatan Olahraga (a) Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja (b) Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji (c) Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah (d) Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas (e) Olahraga Bagi Usia Lanjut (f) Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat			Kab.Tanah Laut	
5	KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN A Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis, Pemantauan & Evaluasi)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<p>(2) Pengadaan Obat</p> <p>(a) Pengadaan Vaksin Reguler</p> <p>(b) Obat <i>Esensial</i></p> <p>(c) Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional</p> <p>(d) Obat Program Malaria</p> <p>(e) Obat Program Kesehatan Anak</p> <p>(f) Obat Program Kesehatan Ibu</p> <p>(g) Obat Program Gizi</p> <p>(h) Obat Anti Tuberkulosis</p> <p>(i) Obat Program Percepatan Pembangunan Kesehatan</p> <p>(j) Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia</p> <p>(k) Obat Penderita <i>Thalassemia</i></p> <p>(l) Obat Psikotropika Generik</p> <p>(m) Obat <i>Anti Retro Viral</i></p> <p>(3) Perbekalan Kesehatan</p> <p>(a) Gudang Farmasi</p> <p>(b) Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan</p> <p>(c) Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan</p> <p>(d) Pengadaan Reagen Screening Darah</p> <p>(e) Obat <i>Buffer Stock</i></p> <p>(f) Hasil <i>Stock Opname</i> Obat</p> <p>B Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan</p> <p>(1) Alat Kesehatan</p> <p>(a) Alat kesehatan</p> <p>(b) Kependium alat kesehatan</p> <p>(c) Pelabelan alat kesehatan dan PKRT</p> <p>(d) Post Market & Surveillance alat kesehatan</p> <p>(e) Produk alat kesehatan elektromedik</p> <p>(f) Produk alat kesehatan non elektromedik</p> <p>(2) Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat</p> <p>(a) Industri Farmasi</p> <p>(b) Pedagang Besar Farmasi</p>			Kab.Tanah Laut	
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none">(c) Pedagang Eceran Obat(d) Penyalur Alat Kesehatan(e) Toko Alat Kesehatan(f) Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan <p>(3) Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Produk Diagnostik In Vitro(b) Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)(c) PKRT Klas III(d) PKRT Klas I dan II(e) Perusahaan Rumah Tangga PKRT(f) Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga(g) Post Market & Surveillance PKRT <p>C Kefarmasian (Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional)</p> <p>(4) Penggunaan Obat Rasional</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Obat Rasional(b) Informasi Obat(c) Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik(d) Pemantauan Terapi Obat <p>D Produksi dan Distribusi Kefarmasian</p> <p>(1) Obat Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Farmakope Indonesia(b) Farmakope Herbal Indonesia(c) Suplemen I Farmakope Indonesia(d) Suplemen II Farmakope Indonesia(e) Suplemen II Farmakope Indonesia(f) Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia(g) Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia(h) Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia(i) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)(j) Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT)	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut</p>	<p>Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut</p> <p>Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(k) Usaha Jamu Gendong (UJG) (l) Usaha Jamu Racik (UJR) (m) Farmakope Herbal Indonesia & Suplemennya Versi (2) Kosmetik dan Makanan (a) Keamanan Pangan (b) Kosmetika bagi Petugas (c) Industri Rumah Tangga bagi Petugas (d) Makanan Jajanan Anak Sekolah (e) Kodeks Kosmetika Indonesia (f) Matera Kosmetika Bahan Alam Indonesia				
7	PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN A Pencegahan, Mitigasi,Kesiapsiagaan (1) Pencegahan dan Mitigasi (2) Kesiapsiagaan B Tanggap Darurat dan Pemulihan (1) Tanggap Darurat (2) Pemulihan C Pemantauan dan Informasi (1) Pemantauan (2) Informasi D Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian E Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PemerintahanKab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut
8	PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN A Tersedianya data NHA Setiap Tahun B Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut
9	KESEHATAN HAJI A Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji (1) Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji (2) Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota (3) Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debarkasi atau	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
10	KKP (4) Pelayanan Kesehatan Embarkasi (5) Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) (6) Rekrutmen Tenaga Musiman B Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko (1) Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji (2) Kesehatan Haji di Kab/kota (3) Kesehatan Haji Terpadu (4) Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji (5) Vaksinasi jamaah Haji (6) Sanitasi Asrama Haji (7) Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut
	PROMOSI KESEHATAN A Sarana Promosi Kesehatan (1) Booklet (2) Poster (3) Leaflet (4) Pamflet (5) Lembar Balik (6) Selebaran (7) Buletin (8) Festival (9) Lomba (10)Pameran (11)Seminar (12)Iklan Layanan Masyarakat (13)Film (14)Radio Spot	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut
	B Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran (1) Saka Bhakti Husada (2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (3) Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
11	Kesehatan (4) Kawasan Tanpa Rokok (5) Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan (6) Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan (7) Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan (8) Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Prov. Kalsel	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut
	C Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan (1) Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan (2) Kampanye Promosi Kesehatan (3) Video Animasi Promosi Kesehatan				
	D Hari Kesehatan (1) Hari Kesehatan Nasional (2) Hari Kesehatan Dunia (3) Hari tanpa Tembakau se-Dunia (4) Hari-hari Besar Kesehatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut
	DATA DAN INFORMASI A Statistik Kesehatan (1) Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan (2) Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut
	B. Analisis dan Diseminasi Informasi (1) Analisis Data Kesehatan (2) Diseminasi Informasi Kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut
	C Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan (1) Pengembangan Sistem Informasi (2) Bank Data				
	D Identitas Penderita HIV/AIDS				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	E Dokumen Rekam Medis Termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	Terbatas	Eselon III	Pemerintah Kab.Tanah Laut Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut
	F Laporan Kasus/Diagnosis Penyakit Pasien	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut
	G Identitas Subjek Penelitian Dalam Rangka Pengembangan Kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut
	H Rahasia Kedokteran, Yaitu Penemuan Dokter Dalam Rangka Pengobatan dan Dicatat Dalam Rangka Medis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut
	I Hasil Audit Medik Pada Sarana Kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut
	J Hasil Audit Terkait Dengan Medical Error	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut
	K Pelepasan Informasi Medis Untuk Kepentingan Klaim Asuransi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
XVI 1	URUSAN PEMERINTAH DAERAH KEBIJAKAN Kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan dalam negeri , kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, bina pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta keuangan daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Pemerintah Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Pemerintahan Setda Kab.Tanah Laut
	2 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK A Pembinaan ideologi dan Pengendalian 1) Pembinaan ideologi Pancasila, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik dan kemasyarakatan 2) Laporan keadaan politik 3) Pemberlakuan keadaan bahaya dan jam malam (a) Pemberitahuan (b) Ketentuan pelaksanaan (c) Pengawasan 4) Monitoring dan evaluasi mengenai keadaan IPOLEKSOSBUD	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Pemerintahan Setda Kab.Tanah Laut
	B Pembinaan Partai Politik 1) Data dan kepengurusan parpol 2) Agenda kerja aktivitas parpol 3) Monitoring kegiatan parpol	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Pemerintahan Setda Kab.Tanah Laut
	C Pengawasan Organisasi Terlarang 1) Pendirian, pembubaran dan pengawasan partai/organisasi terlarang 2) Daftar dan data pengurus anggota partai/organisasi terlarang 3) Pemutihan bagi anggota partai/organisasi terlarang 4) Izin meninggalkan tempat atau pindah domisili bagi anggota partai/organisasi terlarang	Rahasia		Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bag. Pemerintahan Setda Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	5) Daftar organisasi terlarang 6) Laporan mengenai organisasi terlarang				
	D Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Organisasi kemasyarakatan terdiri dari organisasi berdasarkan kesamaan kegiatan dan agama/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Pemerintahan Setda Kab.Tanah Laut
	E Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Pemerintahan Setda Kab.Tanah Laut
	F Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu dan PILKADA 1) Fasilitasi pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2) Fasilitasi pelaksanaan pemilu anggota legislatif 3) Fasilitasi pemilihan kepala daerah 4) Daftar organisasi peserta pemilu (OPP) 5) Fasilitasi pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan daftar pemilih 6) Fasilitasi pengamanan dan pengendalian masa kampanye 7) Fasilitasi dan mediasi sengketa pemilu/PILKADA	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Pemerintahan Setda Kab.Tanah Laut
	G Penanganan Konflik Terorisme Data narapidana teroris pada lembaga pemasyarakatan	Rahasia		Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bag. Pemerintahan Setda Kab.Tanah Laut
	H Kegiatan Intelejen Terkait Dengan Ideologi, Politik, Sosial, Budidaya dan Keamanan Serta Penanganan Kasus Yang Mengganggu Masyarakat 1) Penanganan Terorisme 2) Arsip daftar orang yang masuk G 30 S PKI dan organisasi terlarang lainnya 3) Data narapidana teroris pada lembaga pemasyarakatan	Rahasia		Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bag. Pemerintahan Setda Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
3	PEMERINTAHAN UMUM				
	A Lambang	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Pemerintahan Setda Kab.Tanah Laut
	1) Sayembara				
	2) Penetapan penggunaan lambang				
	3) Ketentuan mengenai lambang pada logo, pataka bentuk dinas, lembaga dan organisasi lainnya				
	B Pemerintah Pusat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Pemerintahan Setda Kab.Tanah Laut
	1) Susunan kabinet				
	(a) Pengangkatan menteri				
	(b) Penunjukan menteri				
	(c) Amanat menteri				
	2) Dewan pertimbangan otonomi daerah				
	(a) Pembantuan keanggotaan				
	(b) Sekretariat DPOD				
	C Pemerintah Daerah				
	1) Pembentukan, pemekaran, peningkatan, pemecahan dan penghapusan wilayah daerah	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bag. Pemerintahan Setda Kab.Tanah Laut
	2) Penyelesaian sengketa batas wilayah	Rahasia	Eselon II		
	3) Administrasi dan dokumentasi perbatasan antar wilayah	Rahasia	Eselon II		
	4) Pemindahan pusat Pemerintahan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Pemerintahan Setda Kab.Tanah Laut
	5) Pemberian, penggantian/perubahan nama wilayah	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	6) Kerjasama antara daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	7) Pencalonan, pengusulan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah/Wakil kepala daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Pemerintahan Setda Kab.Tanah Laut
	8) Pencalonan, pengusulan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD	Terbatas	Eselon III		
	9) Pencalonan, pengusulan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah	Terbatas	Eselon III		
	10) Data anggota DPRD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Pemerintahan Setda Kab.Tanah Laut
	11) Data rancangan-rancangan keputusan DPRD	Terbatas	Eselon III		
	12) Catatan-catatan, Notulen, Risalah rapat yang dinyatakan	Terbatas	Eselon III		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
4	tertutup 13) Laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah 14) Pembinaan lembaga perangkat adat	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Pemerintahan Setda Kab.Tanah Laut
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	A Data dan Informasi Pemberdayaan Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPMD Kab.Tanah Laut
	B Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPMD Kab.Tanah Laut
	C Naskah Ujian Tertulis Bagi Bakal Calon Kepala Desa, Perangkat Desa, Maupun Aparatur Pemerintah Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPMD Kab.Tanah Laut
	D Pembinaan Lembaga Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Prov. Kalsel	DPMD Kab.Tanah Laut
	E Pembinaan Sumber Daya Manusia 1) Latihan Pembangunan Desa Terpadu (LPDT) 2) Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPMD Kab.Tanah Laut
	F Pembinaan Partisipasi Masyarakat 1) Data Proyek Masyarakat 2) Peningkatan Asosiasi LPM	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPMD Kab.Tanah Laut
	G Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPMD Kab.Tanah Laut
	H Pemberdayaan Perempuan dan PKK	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	DPMD

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
				mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Kab.Tanah Laut
	I Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Kesehatan, HIV, AIDS, LB, Bencana Alam, Narkoba, Masalah Sosial	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPMD Kab.Tanah Laut
	J Pembinaan Anak Remaja 1) Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan 2) Pembinaan Program Pasca Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPMD Kab.Tanah Laut
	K Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga 1) Bantuan Pembangunan (a) Program pembangunan desa (b) Program pengembangan kecamatan (c) Program pengentasan kemiskinan (penyaluran raskin) (d) Dana tentang lokasi PKK dan bantuan pembangunan desa/kelurahan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPMD Kab.Tanah Laut DPMD Kab.Tanah Laut
	2) Usaha Keluarga (a) Usaha kecil, jasa, kerajinan dan agrobisnis (b) Usaha kecil menengah dan koperasi (c) Bantuan stimulan (Swasta dan Pemerintah) (d) Optimalisasi hasil kerja/mandiri (e) Penanggulangan kemiskinan (KPK)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPMD Kab.Tanah Laut
	3) Data Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Keluarga, Hasil Usaha Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPMD Kab.Tanah Laut
	4) Bantuan Perkreditan (a) Pembinaan usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) (b) Data usaha simpan pinjam	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPMD Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
5	<p>URUSAN KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA</p> <p>A Perencanaan Umum dan Program Kependudukan</p> <p>1) Pendaftaran Pendudukan Meliputi :</p> <p>(a) Formulir biodata penduduk</p> <p>(b) Formulir permohonan, perpanjangan pembaharuan KTP, # KK dan Mutasi penduduk pengawasan KTP dan Mutasi penduduk</p> <p>(c) Formulir permohonan, perlindungan dokumen KTP, KK dan akta-akta adopsi, perubahan penggantian nama, pemalsuan dokumen, pendidikan, sensus kependudukan, warga negara asing</p> <p>(d) Pengangkatan pejabat luar biasa catatan sipil dan pembantunya</p> <p>(e) Pendaftaran dan perpindahan penduduk WNA</p> <p>(f) Pendaftaran dab perpindahan WNI</p> <p>(g) Pendaftaran dan perpindahan penduduk pengungsi dan rentan, akibat bencana alam, kerusakan soial, daerah terbelakang</p> <p>(h) Proses pengangkatan pejabat luar biasa, pencatatan sipil dan pembantunya</p> <p>B Pencatatan Sipil</p> <p>1) Pencatatan Sipil Meliputi</p> <p>(a) Formulir permohonan akta kelahiran perkawinan, perceraian, ganti perubahan nama kenal lahir/mati, adopi, pendidikan sensus kependudukan perubahan pengganti nama, pemalsuan dokumen</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut</p>	<p>DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut</p> <p>DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(b) Akta kelahiran dan kematian	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut
	(c) Kasus-kasus nikah cerai, rujuk yang meliputi penyelesaian dan laporannya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut
	(d) Kewarganegaraan WNA meliputi, permohonan, kelengkapan persyaratan dan penetapannya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut
	(e) Data dan informasi mengenai pencatatan pewarganegaraan non perkawinan dan kelahiran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut
	(f) Catatan kelahiran dan kematian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut
	(g) Catatan perkawinan dan perceraian agama islam	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	(h) Catatan perkawinan dan perceraian non islam	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	(i) Catatan perkawinan dan perceraian advokasi perkawinan dan perceraian	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	(j) Indentifikasi dan investarisasi sistem, prosedur dan standar pelayanan pencatatan pengangkatan pengakuan, pengesahan anak, perubahan dan pembatalan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut
	(k) Catatan tentang pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, perubahan dan pembatalan akta	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut
	(l) Data dan informasi tentang pencatatan kewarganegaraan akibat perkawinan, kelahiran dan non perkawinan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PemerintahanKab.Tanah Laut	DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut
	(m) Kebijakan dan pedoman teknis pencatatan kewarganegaraan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut
	(n) Bahan-bahan monitoring, pemantauan dan evaluasi pencatatan sipil	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	(o) Sistem dokumentasi pencatatan sipil	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan	DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<p>C Informasi Kependudukan</p> <p>1) Pengembangan perakat lunak, keras dan jaringan komunikasi data</p> <p>2) Fasilitas teknis pengembangan perangkat lunak, keras, jaringan komunikasi data</p> <p>3) Manual teknis pengolahan data pendaftaran penduduk dan catatan sipil, daerah maju / berkembang</p> <p>4) Kebijakan dan pedoman teknis pengolahan data pendaftaran penduduk, biodata, NIK, KTP dan KK</p> <p>5) Manual teknis pengolahan data kejadian vital meliputi kelahiran, kematian, kedatangan dan perpindahan penduduk</p> <p>6) Manual teknis pengolahan data penduduk dan non registrasi</p> <p>7) Manual teknis pengolahan sistem pelayanan media elektronik cetak dan outlet</p> <p>8) Fasilitas pelayanan media elektronik, cetak dan outlet</p> <p>9) Bahan-bahan monitoring, pemantauan dan evaluasi informasi kependudukan</p> <p>10) Sistem dokumentasi informasi kependudukan</p> <p>D Perkembangan Penduduk</p> <p>1) Struktur dan komposisi penduduk</p> <p>2) Fertilitas, kesehatan dan reproduksi</p> <p>3) Morbilitas dan mortalitas penduduk dan fasilitas</p> <p>4) Data kuantitas penduduk</p> <p>5) Data kualitas penduduk</p> <p>6) Pengembangan kualitas anak, remaja, penduduk usia</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon III</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon III</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Kab.Tanah Laut</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>Kab.Tanah Laut</p> <p>DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut</p> <p>DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut</p> <p>DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut</p> <p>DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut</p> <p>DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	produktif dan lanjut usia 7) Data informasi pengembangan kualitas penduduk 8) Penataan persebaran penduduk antara wil sementara dan migran non permanen 9) Data dan informasi persebaran penduduk 10) Telaahan dan pengkajian sistem perlindungan dan pemberdayaan penduduk 11) Penataan penduduk sementara dan non migran permanen 12) Manual teknis perlindungan penduduk 13) Telaahan dan kajian pengelolaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan sosial budaya 14) Manual teknis pelayanan kelembagaan pemberdayaan masyarakat ekonomi dan sosial budaya 15) Telaahan dan pengkajian pengembangan wawasan kependudukan melalui pendidikan jalur sekolah, luar	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut
	E Proyeksi dan Penyesuaian Kebijakan Kependudukan 1) Telaahan dan pengkajian pengembangan, dokumentasi, pemanfaatan data kependudukan 2) Kebijakan dan pedoman teknis kependudukan 3) Telaahan dan pengkajian implikasi, analisis, struktur dan komposisi, pemanfaatan proyeksi penduduk 4) Data, informasi dan dokumentasi proyeksi penduduk 5) Klasifikasi dan pedoman teknis proyeksi penduduk 6) Telaahan dan pengkajian dampak kependudukan advokasi dan standarisasi 7) Kebijakan dan pedoman teknis analisis dampak kependudukan 8) Telaahan dan pengkajian penyerasian lembaga usaha swasta, masyarakat dan mitra Internasional 9) Penyelesaian lembaga pemerintahan pusat, provinsi,	 Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	 Eselon III Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	 Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang	DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut DISDUKCAPIL

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
XVII 1	kabupaten/kota				Kab.Tanah Laut
	10) Kebiajakn dan pedoman teknis penyelesaian kelembagaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut
	F Kewarganegaraan Asing 1) Laporan jumlah WNI keturunan asing	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut
	G Keluarga Berencana 1) Kebijakan yang ada hubunganya dengan program Keluarga Berencana 2) Pengadaan prasarana dan sarana untuk Keluarga Berencana gedung/bangunan, sarana mobilitas dan sarana lainnya 3) Penghargaan terhadap KB lestari 4) Pembinaan Keluarga Berencana 5) Laporan peserta KB (a) Penggunaan alat kontrasepsi KB, spiral IUD, pil, kondom, sterilisasi/vasektomi 6) Data/hasil evaluasi mengenai pelaksanaan KB 7) Hasil pertemuan, seminar, survei ilmiah KB 8) Laporan kasus masalah KB 9) Laporan umum pelaksanaan program KB	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DISDUKCAPIL Kab.Tanah Laut
	URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1 KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN A Kebijakan tentang pendidikan dan Pengajaran meliputi: kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, menengah, atas dan pendidikan tinggi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut
	B MoU (Memorandum of Understanding)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	DPDK Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
2	KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Pemerintah Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut
3	PEMBINAAN PENDIDIKAN A Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal (1) Paud (a) Bahan ajar - Alat permainan edukatif (b) Pelatihan (c) <i>Block Grant</i> (d) Sosialisasi (e) Peringatan hari anak nasional (2) Pendidikan masyarakat (a) Penyelenggaraan program - Bahan ajar - Penyusunan majalah (b) Pemberian bantuan sosial - Penilaian proposal - Pemberian bansos (c) Pembinaan program - Temu koordinasi - Bintek program/pendampingan - Peningkatan kapasitas kelembagaan (d) Lomba, penghargaan, dan anugerah (e) Peringatan hari anak nasional (f) Pameran/publikasi/sosialisasi (3) Kursus dan pelatihan (a) PenPenyelenggaraan program - Uji kompetensi (akreditasi) - Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan (LKP)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none">- Pendataan lembaga kursus dan pelatihan- Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra(b) Pemberian bantuan sosial(c) Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu karya(d) Standar kursus dan pelatihan<ul style="list-style-type: none">- Kurikulum- Bahan ajar(e) Lomba lembaga kursus berprestasi(f) Publikasi dan promosi kursus(g) Sertifikasi				DPDK Kab.Tanah Laut
	<p>(4) Pendidik dan tenaga pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Bahan ajar(b) <i>Block grant</i>(c) Sosialisasi (modul)(d) Data pendidik dan tenaga pendidik	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	
B Pendidikan dasar	<p>(1) Sekolah dasar</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Kurikulum(b) Bahan ajar(c) Pelatihan(d) <i>Block grant</i>(e) Bimbingan teknis/sosialisasi(f) Lomba, sayembara, dan festival(g) Bantuan operasional sekolah [BOS](h) Bantuan siswa miskin <p>(2) Sekolah menengah pertama</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Kurikulum(b) Bahan ajar(c) Pelatihan(d) <i>Block grant</i>(e) Bimbingan teknis/sosialisasi(f) Lomba, sayembara, dan festival(g) Bantuan operasional sekolah [BOS](h) Bantuan siswa miskin				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
1	2	3	4	5	6	
	<div>(3) Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK<ul style="list-style-type: none">(a) Bahan ajar(b) Petunjuk teknis(c) <i>Block grant</i>(d) Sosialisasi(e) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore(f) Kurikulum/bahan pembelajaran(g) Alat bantu pembelajaran(h) Pendataan(i) Kelembagaan<ul style="list-style-type: none">- Unit kesehatan sekolah- Pendidikan jasmani adaptif- Pendidikan inklusi- <i>Block grant</i>- Bimbingan teknis/sosialisasi- Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore</div> <div>(4) Pendidik dan tenaga pendidik<ul style="list-style-type: none">(a) Pendataan dan pemetaan(b) Pembinaan guru dan tenaga pendidik(c) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)(d) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah(e) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan(f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan(g) <i>Block grant</i>(h) Bimbingan teknis/sosialisasi</div> <div>C Pendidikan menengah<ul style="list-style-type: none">(1) Sekolah menengah atas dan SMK<ul style="list-style-type: none">(a) Kurikulum(b) Bahan ajar(c) Pelatihan(d) <i>Block Grant</i></div>					
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut	

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(e) Bimbingan teknis/sosialisasi (f) Lomba, sayembara, dan festival (g) Bantuan operasional sekolah [BOS] (h) Bantuan siswa miskin (2) Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK (a) Bahan ajar (b) Petunjuk teknis (c) <i>Block grant</i> (d) Sosialisasi (e) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore (f) Kurikulum/bahan pembelajaran (g) Alat bantu pembelajaran (h) Pendataan (i) Kelembagaan - Unit kesehatan sekolah - Pendidikan jasmani adaptif - Pendidikan inklusi - <i>Block grant</i> - Bimbingan teknis/sosialisasi - Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore				DPDK Kab.Tanah Laut
	(3) Pendidik dan tenaga pendidik (a) Pendataan dan pemetaan (b) Pembinaan guru dan tenaga pendidik (c) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi) (d) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah (e) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan (f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan (g) <i>Block grant</i> (h) Bimbingan teknis/sosialisasi D Naskah Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Lembaga	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
4	E Proses Scanning Lembar Hasil Ujian	Terbatas	Eselon III	Pemerintah Kab.Tanah Laut Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut
	F Proses Pengelolaan Data Peserta Didik, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Sarana Prasarana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut
	KEBUDAYAAN				
	A Pelestarian cagar budaya dan permuseuman				
	(1) Registrasi nasional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut
	(a) Pendaftaran dan penetapan				
	(b) Pengelolaan data				
	(2) Pelindungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut
	(a) Perizinan dan pengamanan				
	(b) Pemeliharaan dan pemugaran				
	(3) Pengembangan dan pemanfaatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut
	(a) Pengembangan				
	(b) Pemanfaatan				
	(4) Eksplorasi dan dokumentasi				
	(a) Eksplorasi cagar budaya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut
	(b) Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut
	(c) kebudayaan dan pariwisata	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut
	B Pembinaan kesenian dan perfilman	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	DPDK

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(1) Pembinaan seni pertunjukan (a) Seni pertunjukan tradisional (b) Seni pertunjukan nontradisional (2) Pembinaan seni rupa (a) Seni rupa murni (b) Seni rupa terapan (3) Pembinaan literasi dan apresiasi film (a) Literasi (b) Apresiasi (4) Dokumentasi dan publikasi (a) Dokumentasi seni dan film (b) Publikasi seni dan film			mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Kab.Tanah Laut
	C Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan trad (1) Kelembagaan dan kepercayaan (a) Pemberdayaan lembaga (b) Hubungan antar lembaga (2) Komunitas kepercayaan (a) Komunitas adat (b) Upacara adat (3) Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional (a) Pengetahuan tradisional (b) Ekspresi budaya tradisional (4) Lingkungan budaya dan pranata sosial (a) Lingkungan budaya (b) Pranata sosial D Sejarah dan nilai budaya (1) Sejarah (a) Penggalian sumber sejarah (b) Penulisan sejarah (2) Pemetaan nilai (a) Pemetaan (b) Klasifikasi (3) Verifikasi dan perumusan nilai	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(a) Verifikasi nilai (b) Perumusan nilai (4) Dokumentasi dan publikasi (a) Dokumentasi sejarah dan nilai budaya (b) Publikasi sejarah dan nilai budaya				
	E Internalisasi nilai dan diplomasi budaya (1) Internalisasi nilai budaya (a) Pengemasan nilai budaya (b) Penanaman nilai budaya (2) Kekayaan budaya (a) Pencatatan kekayaan budaya (b) Penetapan kekayaan budaya (3) Warisan budaya nasional dan dunia (a) Warisan budaya benda (b) Warisan budaya takbenda (4) Diplomasi budaya (a) Diplomasi dalam negeri (b) Diplomasi luar negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut
5	KURIKULUM A Pembinaan kurikulum B Hasil evaluasi penyusunan kurikulum	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut
6	PERBUKUAN A Penyusunan standar mutu buku B Pengumpulan naskah C Penilaian mutu buku dan pemilihan D Persetujuan dan pengesahan naskah E Penerbitan/pencetakan F Master buku/naskah yang dicetak G Distribusi buku H Pengembangan naskah I Pengkajian buku	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
7	PENILAIAN PENDIDIKAN A Penilaian akademik B Penilaian non akademik C Analisis dan sistem informasi penilaian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PemerintahanKab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut
8	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA A Pengembangan dan perlindungan (1) Pengkajian (a) Bahasa (b) Sastra (2) Pembakuan dan perlindungan (3) Informasi dan publikasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut
9	B Pembinaan dan pemasyarakatan (1) Pemasyarakatan (a) Penyuluhan (b) Bantuan teknis	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut
	C Pembelajaran (a) Proses pembelajaran (b) Pembinaan tenaga kebahasaan dan kesusasteraan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut
	D Peningkatan dan pengendalian (a) Peningkatan fungsi dan peran (b) Pengendalian penggunaan bahasa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut
	PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN A Pengembangan profesi pendidik (1) Peningkatan kompetensi (a) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal (b) Pengembangan profesi pendidikan dasar (c) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah dan kejuruan (2) Sertifikasi (a) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PemerintahanKab.Tanah Laut	DPDK Kab.Tanah Laut

[illegible]

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	G Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Kab.Tanah Laut DPDK
	H Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Kab.Tanah Laut DPDK
10	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN A Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film (1) Perancangan dan produksi (2) Penyiaran dan pengendalian B Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan <i>web</i> (1) Perancangan dan produksi (2) Aplikasi dan pengendalian C Pengembangan jejaring (1) Pengkajian dan perancangan (2) Pemeliharaan dan pengendalian	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Kab.Tanah Laut DPDK Kab.Tanah Laut DPDK Kab.Tanah Laut DPDK
11	DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN A Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan (1) Validasi dan integrasi data peserta didik (2) Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan B Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran (1) Validasi dan integrasi data satuan pendidikan (2) Validasi dan integrasi data proses pembelajaran C Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang	Kab.Tanah Laut DPDK Kab.Tanah Laut DPDK DPDK

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
12	(1) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak (2) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Kab.Tanah Laut
	ARKEOLOGI A Program dan kerja sama penelitian (1) Program (2) Kerja sama			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPO Kab.Tanah Laut
13	B Data dan informasi penelitian (1) Data (2) Informasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPO Kab.Tanah Laut
	MONITORING DAN EVALUASI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPO Kab.Tanah Laut
XVIII	URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
1	Pemberdayaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda : A Seleksi Pertukaran Pemuda Antara Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara B Paduan suara dalam rangka HUT RI dan hari - hari besar nasional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPO Kab.Tanah Laut
2	Peningkatan Wawasan, Iptek dan Imtaq Pemuda : A Peningkatan iman dan taqwa B Sosialisasi kebijakan kepemudaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPO Kab.Tanah Laut
3	Peningkatan Kapasitas dan Kreatifitas Pemuda : A Sarjana dan pemuda penggerak pembangunan pendidikan (SP4) B Napak tilas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPO Kab.Tanah Laut
4	Kepemimpinan, Kepeloporan, kepramukaan dan Organisasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	DPO Kab.Tanah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	Kepemudaan A Pelatihan Paskibraka tingkat Provinsi B Peningkatan wawasan kepaskibrakaan			mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Kab.Tanah Laut
5	Pengembangan Standarisasi dan Infastruktur Pemuda : A Pelatihan Satgas bencana bagi Pramuka dan pemuda B Kepeloporan pemuda daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPO Kab.Tanah Laut
6	Kewirausahaan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda : A Seleksi Paskibraka tingkat Provinsi dan Nasional B Pengembangan sarana kewirausahaan pemuda	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPO Prov. Kalsel
7	Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga A Pengembangan dan pembibitan olahragawan (Sentra Olahraga) B Pembinaan dan pengembangan PPLP	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPO Kab.Tanah Laut
8	Pengembangan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus A Festival pencak silat/kuntaw tingkat Provinsi B Pelestarian olahraga permainan tradisional C Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA) tingkat Provinsi D Peringatan HAORNAS	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPO Kab.Tanah Laut
9	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga : A Jalan sehat HUT RI dan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan B Lomba gerak jalan 17,8,45 Km tingkat Provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPO Kab.Tanah Laut
10	Pembibitan da Tenaga Olahraga A POPDA Paralympic (Soina) B Pembibitan dan pembinaan olahraga Paralympic Berbakat (PEPARDA) C Kompetisi sepak bola pelajar, tenis lapangan, tenis meja, angkat besi, dayung, judo, taekwondo, bola voli, atlentik dan panahan D Keberangkatan Kontogen pekan olahraga pelajar wilayah /Nasional (POPWIL/POPONAS) E Pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat (POPDA)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	DPO Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
11	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Olahraga : A Grand design keolahragaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Kesra Setda Kab.Tanah Laut
12	Standarisasi Sarana dan Prasarana Olahraga : A Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana B Peningkatan lapangan tenis pelajar Kalimantan Selatan	Rahasia	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bag. Kesra Setda Kab.Tanah Laut
XIX	URUSAN AGAMA				
1	Kebijakan Keagamaan Meliputi Kebijakan di Bidang Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Budha, Kerukunan Umat Beragama dan Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Kesra Setda Kab.Tanah Laut
2	Bimbingan Masyarakat Islam				
	A Wakaf				
	1) Permohonan lain tukar menukar Tanah Wakaf (Ruislah)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Kesra Setda Kab.Tanah Laut
	2) Permohonan penunjukan Lembaga Keuangan Syariah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Kesra Setda Kab.Tanah Laut
	3) Bantuan Pengembangan Wakaf Produktif	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Kalsel	Bag. Kesra Setda Kab.Tanah Laut
	4) Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	
	5) Pendataan Wakaf	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Kesra Setda Kab.Tanah Laut
	6) Akta Ikrar Wakaf	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Kesra Setda Kab.Tanah Laut
	7) Formulir Wakaf	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan	Bag. Kesra Setda Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	8) Surat Pengesahan Nadzir Wakaf	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Kesra Setda Kab.Tanah Laut
	B Zakat 1) Bimbingan dan pembinaan Lembaga Zakat 2) Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Kesra Setda Kab.Tanah Laut
	C Rumah ibadah 1) Bantuan pengelola rumah ibadah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Prov. Kalsel	Bag. Kesra Setda Kab.Tanah Laut
	2) Bantuan rumah ibadah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Kesra Setda Kab.Tanah Laut
	3) Penyuluhan dan bimbingan kemasjidan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Kesra Setda Kab.Tanah Laut
	D Kerukunan umat beragama 1) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Kesra Setda Kab.Tanah Laut
	E Event Keagamaan 1) Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2) Seleksi Tilawatil Quran (STQ) 3) Dharma Gita 4) Pesparawi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab.Tanah Laut	Bag. Kesra Setda Kab.Tanah Laut
	F Penyelenggaraan Haji dan Umroh 1) Penetapan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Kesra Setda Kab.Tanah Laut
XXI	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
1	Standar kebijakan umum bidang PU : pengairan, jalan, jembatan,				
	A Pengairan : 1) Pembangunan bar 2) Rahabilitasi 3) Pemeliharaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
	B Jalan : 1) Pembangunan baru 2) Rehabilitasi 3) Pemeliharaan 4) Peningkaran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
	C Jembatan 1) Pembangunan baru 2) Rehabilitasi 3) Pemeliharaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
	D Bangunan : 1) Pendirian 2) Pemeliharaan 3) Pembahasan dan penertiban bangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
	E Tata Kota 1) RIK (Rencana Induk Kota) 2) Rencana detail tata ruang kota 3) Rencana terinci kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
	F Peta tanah bangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV		DPUPR Kab.Tanah Laut
	G Gambar Kontruksi (blue print)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
	H Data industri konstruksi bangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV		DPUPR Kab.Tanah Laut
	I Studi kelayakan : Studi pendahuluan, studi pra kelayakan dan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)	Biasa/Terbuka	Eselon IV		DPUPR Kab.Tanah Laut
	J Standarisasi, kriteria teknis, spesifikasi, manual teknis dan prose	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
	K Pelaksanaan bidang PU 1) Pemberian izin bidang PU Meliputi : Izin mendirikan	Biasa/Terbuka	Eselon IV		DPUPR Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
L	2) Permohonan perizinan yang ditolak				
	3) Keringan pemberian izin meliputi : Permohonan pembebasan atas pemberian keringanan				
	4) Pembatalan izin meliputi : Pengadaan, hasil pemeriksaan / peninjauan, pembebasan,				
	5) Dokumen pelaksanaan pengadaan lahan				
	Kontraktor dan pemborong (tender, penunjuk, prakualifikasi)				
	1) Daftar rekanan meliputi : Daftar rekanan golongan ekonomi lemah, daftar rekanan mampu dan tanda daftar rekanan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Kalsel	DPUPR Kab.Tanah Laut
	2) Permohonan prakualifikasi dan klasifikasi perusahaan meliputi : a) Permohonan, persyaratan, hasil penelitian	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan gambar-gambar teknis sebelum menjadi kontrak untuk pengadaan barang / jasa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Kalsel	DPUPR Kab.Tanah Laut
	3) Kasus-kasus dalam pelaksanaan prakualifikasi perusahaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Kalsel	DPUPR Kab.Tanah Laut
	4) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan gambar-gambar teknis sebelum menjadi kontrak untuk pengadaan barang/jasa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
M	Pengadaan barang / jasa melalui lelang	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
N	1) Umum				
	2) Terbatas				
O	3) Pemilihan Langsung				
	4) Penunjukan langsung				
P	Pengadaan barang / jasa melalui swakelola tanah dan batu, aspal, besi dan logam lainnya, bahan-bahan pelindung dan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Kalsel	DPUPR Kab.Tanah Laut
Q	Konsultasi bangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Kalsel	DPUPR Kab.Tanah Laut
	Penertiban bangunan meliputi : Penertiban tanpa izin / tidak memenuhi syarat / ketentuan yang berlaku, bangunan yang sudah membahayakan / lapuk, peringatan / teguran,	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
	Penertiban bangunan meliputi : penertiban tanpa izin / tidak memenuhi syarat/ketentuan yang berlaku, bangunan yang sudah membahayakan / lapuk, peringatan / teguran,	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	R Inventaris bangunan kepunyaan dan atau yang disukai oleh pemerintahan termasuk bukti kepemilikan dan cara perolehannya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
	S Peta bangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
	1) Pembuatan, peta, blue print, pemeliharaan, perbaikan, 2) Pembuatan, pemeliharaan dan rehabilitasi saluran 3) Inventarisasi bangunan-bangunan pengairan Inventarisssi 4) Pemeliharaan dan pengelolaan pengairan oleh perkumpulan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
	T Pengelolaan air minum				
	1) Penyediaan fasilitas air bersih 2) Distribusi pemakaian air bersih 3) Pengawasan penggunaan air bersih 4) Data dan statistik air bersih	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
	U Pengelolaan Jalan				
	1) Pemeliharaan dan perbaikan jalan 2) Penyediaan lokasi/area jalan 3) Pelebaran dan pemindahan jalan 4) Inventarisasi jalan 5) Data lalu lintas dan penggunaan jalan 6) Laporan penelitian jalan 7) Laporan kerusakan jalan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
	V Lingkungan hidup				
	1) Pembinaan dan penyuluhan lingkungan hidup 2) Pengawasan dan pengendalian tata lingkungan hidup 3) Pengawasan lingkungan hidup, cagar budaya, tanaman 4) Pencemaran dan penanggulangan pencemaran lingkungan 5) Penghargaan bidang lingkungan hidup 6) Pemberiaan izin berburu satwa, izin galian golongan C dan 7) Pembinaan dan penyuluhan lingkungan hidup	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
	W Pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian tata llingkungan hid				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	1) Wilayah lingkungan hidup lingkungan industri, rekreasi, 2) Pelestarian lingkungan meliputi antara lain : Penetapan Q Pencemaran lingkungan dan penanggulangannya meliputi :	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Kab.Tanah Laut Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
	1) Pencemaran udara, limbah industri dan kebisingan 2) Pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam pemeliharaan 3) Pelestarian lingkungan hidup Y Pemberian izin meliputi :	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
	1) Izin berburu satwa yang dilindungi, izin bahan galian golongan 2) Data statistik lingkungan hidup daerah 3) Hasil-hasil seminar, simposium, lokakarya dan sejenisnya m 4) Pengawasan dibidang lingkungan hidup	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
	5) Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
	Z Amdal meliputi :	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DPUPR Kab.Tanah Laut
	1) Kebijakan Teknis Amdal 2) Pengkajian dan Penilaian Dokumen Amdal 3) Evaluasi dan RKL dan RPL 4) Penghargaan Adipura				

Pj.BUPATI TANAH LAUT

ttd.

H. SISWANSYAH